

A N A L I S I S
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
JAWA TENGAH
BERDASAR FAKTOR – FAKTOR
YANG MEMPENGARUHINYA



TESIS

untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana S-2

Program Studi
Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Oleh
Nadi Santoso
C4B000118

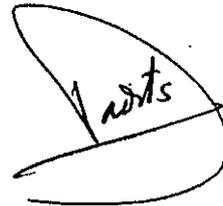
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Desember
2002

PERNYATAAN

Saya, Nadi Santoso, yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis yang saya ajukan ini adalah hasil karya saya sendiri yang belum pernah disampaikan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan dari suatu Perguruan Tinggi dan lembaga pendidikan lainnya . Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan manapun belum/ tidak diterbitkan , sumbernya dijelaskan di dalam daftar pustaka

Karya ini adalah milik saya karena itu pertanggungjawabannya berada di pundak saya.

Semarang, Desember 2002

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nadi Santoso', enclosed within a hand-drawn oval shape.

Nadi Santoso.

TESIS
ANALISIS
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
JAWA TENGAH
BERDASAR FAKTOR – FAKTOR
YANG MEMPENGARUHINYA

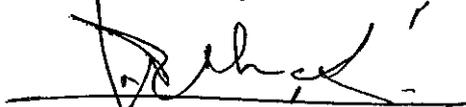
disusun oleh

Nadi Santoso
C4B000118

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal : 23 Desember 2002
dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing Utama



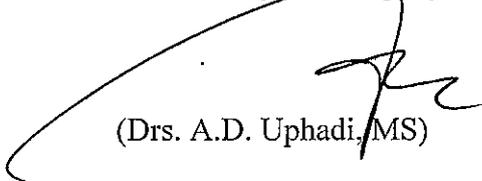
(Drs. G.B. Pakpahan, MM.)

Anggota Penguji

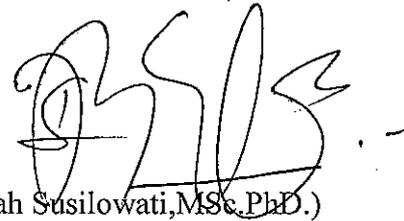


(Drs. Wiratno, MEc.)

Pembimbing Pendamping



(Drs. A.D. Uphadi, MS)



(Dra. Indah Susilowati, MSc, PhD.)



(Dra. Johanna Maria Kodoatie, G.Dipl Ec. MEc.)

Semarang, Januari 2003

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan



(DR. Syafrudin Budiningharto)

Motto :

Jadilah diri kita sendiri

*Karya Ilmiah ini aku persembahkan
untuk :*

*Bapak (Alm) dan Ibu Soewarso
Isteriku tersayang
Kedua Mertua, Adik-adikku dan
Kakak-Kakakku*

ABSTRACT

This study is motivated by the facts that the Central Java Gross Regional Domestic Product (GRDP) has been fluctuated and its value is far from other provinces in Java during the period study. Additionally, its GRDP has been experienced negative growth.

The objectives of this study are twofold: first, to analyze the factors affecting the value of Central Java GRDP; second, to analyze the impact of economic crisis on the Central Java GRDP.

This study makes use of time series data of 1980 – 2001 and it utilizes regression analysis of "*Ordinary Least Square (OLS)*".

The findings of this study suggest that (1) commodities export, foreign investment, and public saving do give a positive impact on the fluctuation of Central Java GRDP whereas tax revenues and economic crisis negatively affect to the value of GRDP.

In order to increase in Central Java GRDP, the efforts need to be done are as follows: export expansion, investment opportunity and public saving encouragement and tax-reformed regulation.

Keywords: Gross Regional Domestic Product (GRDP), Central Java, Export, Investment, Public Saving, Tax and, economic crisis.

ABSTRAKSI

Penelitian ini diangkat berdasarkan kenyataan bahwa nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah pada periode studi mengalami fluktuasi dan berada di bawah Propinsi lain di Pulau Jawa serta pada kondisi krisis nilainya mengalami pertumbuhan negatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto Jawa Tengah dan menganalisis pengaruh krisis terhadap Produk Domestik Regional Bruto Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan data runtun waktu dari tahun 1980 – 2001 dan metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi "*Ordinary Least Square (OLS)*".

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa ekspor barang, investasi asing, tabungan masyarakat berpengaruh positif terhadap nilai PDRB Jawa Tengah. Panerimaan pajak dan kondisi krisis ekonomi berpengaruh negatif terhadap nilai PDRB Jawa Tengah.

Guna meningkatkan nilai PDRB Jawa Tengah upaya yang perlu dilakukan antara lain peningkatan ekspor, mendukung penanaman modal, menggalang tabungan masyarakat dan pengaturan pajak.

Kata kunci: PDRB, Jawa Tengah, ekspor, investasi, tabungan masyarakat, pajak, krisis ekonomi

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Karunia Nya melalui perjuangan keras akhirnya Penulis mampu menyelesaikan Tesis ini dengan judul “ **Analisis Produk Domestik Regional Bruto Jawa Tengah Berdasar Faktor – Faktor Yang Mempengaruhinya** “. Tesis ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai derajat Sarjana S-2 pada Program Studi Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro.

Keberhasilan dalam menyelesaikan penulisan tesis ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan ketulusan hati kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak H. Mardiyanto selaku Gubernur Jawa Tengah yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menempuh Tugas Belajar di Program Studi Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Diponegoro Semarang ,
2. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang ,
3. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang ,
4. Bapak Dr. Syafrudin Budiningharto selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro Semarang yang telah membantu kelancaran, dorongan dan motivasi dalam penyelesaian tesis.

5. Bapak Drs. G.B. Pakpahan, MM selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak sekali memberikan bimbingan, koreksi, arahan serta masukan-masukan yang sangat bermanfaat bagi tersusunnya tesis ini .
6. Bapak Drs. A.D. Uphadi, MS, selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah membantu dalam penyusunan tesis .
7. Para Dosen Pengampu mata kuliah dan teman-teman Angkatan I Program Studi Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro Semarang melalui diskusi – diskusi kecil telah banyak memberikan masukan dan wawasan.
8. Bagian Admisi, mbak Tanti, mbak Susi dan mas Marsono yang telah dengan sabar memberikan pelayanan selama masa studi.
9. Tak lupa , yang paling aku cintai Istriku yang mulai sejak berpacaran telah memberikan motivasi , dan do'a atas kelancaran studi .
10. Yanuar, Dimas serta semua pihak yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung atas kelancaran penyusunan Tesis ini.

Menyadari berbagai keterbatasan yang penulis miliki, bagi orang lain tesis ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan.

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat baik bagi diri sendiri ,
Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan bagi peneliti lain yang berminat dalam bidang
pembangunan ekonomi daerah. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan
kepada kita semua..... Amin.....

Semarang, Desember 2002

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
ABSTRAKSI.....	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Pemasalahan.....	1
1.2. Perumusan Masalah	7
1.3. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS	
2.1 Tinjauan Pustaka	
2.1.1 Landasan Teori	
2.1.1.1. Produk Domestik Regional Bruto.....	10
2.1.1.2. Model Pertumbuhan Ekonomi Harrod Domar.....	13
2.1.1.3. Investasi	18
2.1.1.4. Tabungan	21
2.1.1.5. Ekspor - Impor.....	23

2.1.1.6. Penerimaan Pajak	26
2.1.1.7. Angkatan Kerja	29
2.1.2 Hasil Studi Penelitian Terdahulu	33
2.2. Kerangka Pemikiran Teoritis	35
2.3. Hipotesis	36

BAB. III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data	37
3.2. Metode Pengumpulan Data	38
3.3. Teknik Analisis	
3.3.1. Spesifikasi Model	38
3.3.2. Definisi Operasional Variabel	40
3.3.3. Prosedur Analisis	41
3.3.4. Justifikasi Statistik	44

BAB IV. GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

4.1. Letak Geografi.....	45
4.2. Kependudukan	46
4.3. Pembagian Wilayah Pembangunan	48
4.4. Ekonomi Daerah	49
4.5. Perdagangan.....	51
4.6. Penanaman Modal	55

BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Uji Asumsi Klasik	59
5.2. Hasil Analisis	63

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan.....	73
6.2. Limitasi Studi	74
6.3. Saran	74

Daftar Pustaka

Lampiran

Biodata

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 PDRB Atas Harga Konstan Propinsi-Propinsi di Pulau Jawa Tahun 1980-2001.....	3
Tabel 1.2. Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang Telah Mendapatkan Persetujuan Tetap di Jawa Tengah Tahun 1980 – 2001	4
Tabel 1.6. Nilai Ekspor dan Impor Barang di Jawa Tengah Tahun 1980-2001.	6
Tabel 2.1. Ringkasan Hasil Studi Terdahulu yang Terkait dengan Penelitian.....	33
Tabel 3.1. Definisi Operasional Variabel	40
Tabel 4.1. Penduduk Jawa Tengah Berumur 10 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Tahun 1979 – 1995	47
Tabel 4.2. Pembagian Wilayah Pembangunan di Jawa Tengah	42
Tabel 4.3. Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha atas Harga Konstan 1993 Propinsi Jawa Tengah Tahun 1993 – 2001.....	50
Tabel 4.4. Volume dan Nilai Ekspor Jawa Tengah Menurut Golongan Tahun 1991 – 1995	52
Tabel 4.5. Nilai PMA yang Telah Mendapatkan Surat Persetujuan Tetap Tahun 1993 – 2001	56
Tabel 4.6. Nilai PMDN Yang Telah Mendapatkan Surat Persetujuan Tetap Tahun 1993 – 2001	57

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pemikiran Teoritis.....	64

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Rekapitulasi Data Mentah
- Lampiran 2. Hasil Estimasi Dengan OLS
- Lampiran 3. Hasil Uji Multicollinearity Dengan Metode Regresi Parsial
- Lampiran 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas Dengan Metode PARK
- Lampiran 5. Biodata Penulis.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Paradigma baru pembangunan telah disadari oleh banyak negara bahwa pertumbuhan (*growth*) tidak identik dengan pembangunan (*development*). Pertumbuhan yang tinggi di Negara Sedang Berkembang, setidaknya melampaui Negara Maju, pada tahap awal Pembangunan, ternyata dapat di capai namun di barengi dengan masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan di pedesaan, distribusi pendapatan yang timpang dan ketidakseimbangan struktural. Pertumbuhan ekonomi dianggap hanya merupakan syarat yang diperlukan (*necessary*) tetapi tidak mencukupi (*sufficient*) (Mudrajat K,1999).

Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dalam pertumbuhan ekonomi, biasanya ditelaah proses produksi yang melibatkan sejumlah jenis produk dengan menggunakan sejumlah sarana dan prasarana produksi (Soemitro, 1993). Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor ekonomi dan non ekonomi (Jhingan, 1983). Todaro (1997) berpendapat bahwa ada 3 (tiga) faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap negara yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi.

Meir dan Baldwin dalam Kamaluddin (1980) mengemukakan ada 6 (enam) supaya proses pembangunan dapat berjalan sebagaimana diharapkan, yaitu berkaitan

UPT-PUSTAK-UNDI

dengan hal; a) Indegenous forces (kekuatan dari dalam) untuk berkembang; b) mobilitas faktor produksi; c) akumulasi; d) kriteria atau arah investasi yang sesuai dengan kebutuhan ; e) penyerapan kapital, dan f) kondisi lembaga-lembaga yang ada.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/Propinsi dalam satu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Tabel 1.1. menunjukkan bahwa PDRB atas harga konstan pada periode tahun 1980 – 1996 , Propinsi Jawa Tengah masih di bawah Propinsi-Propinsi lain di Pulau Jawa. Propinsi Jawa Barat menempati peringkat pertama yang kemudian diikuti oleh Jawa Timur dan DKI Jakarta . Nilainya selisih antara Rp. 3.000 – Rp. 4.000 milyar setiap tahunnya, demikian juga dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah masih di bawah Propinsi-Propinsi lain di Pulau Jawa (tabel 1.1).

Tabel 1.1.
PDRB Atas Harga Konstan Propinsi - Propinsi Di Pulau Jawa
Tahun 1986 - 2001 (dalam milyar rupiah)

Tahun	Propinsi/PDRB							
	Jawa Tengah		Jawa Timur		DKI Jakarta		Jawa Barat	
	H. Konstan (Rp.)	Pertumb. (%)	H. Konstan (Rp)	Pertumb. (%)	H. Konstan (Rp)	Pertumb. (%)	H. Konstan (Rp.)	Pertumb. (%)
1980	1.717	13.0	2.871		1,737		2,634	
1981	2.033	12.4	3.186	8.7	1,998	15.0	2,933	11.4
1982	2.126	4.6	3.246	1.9	2,119	6.1	3,109	6.0
1983	7.132	4.6	10,848	6.8	7,818	8.9	10,191	9.5
1984	7,871	6.5	11,513	8.9	8,648	10.6	11,440	12.3
1985	8,473	7.6	12,147	5.5	9,013	4.2	12,347	7.9
1986	8,973	5.9	12,895	6	9,445	4.8	12,896	4.4
1987	9,450	5.9	13,523	4.9	9,995	5.8	13,524	4.87
1988	10,652	6.3	14,420	6.6	10,817	6.6	14,453	8.07
1989	11,340	6.5	15,495	7.5	12,586	9.7	16,409	8.19
1990	12,134	7.0	16,736	8.0	13,664	8.6	17,959	9.45
1991	13,002	7.2	17,924	7.1	14,708	7.6	19,230	7.08
1992	13,970	7.4	19,185	7.0	16,002	8.8	20,541	6.82
1993	33,979	6.1	49,172	6.9	51,106	8.4	52,675	6.89
1994	36,345	7.0	52,727	8.2	55,505	9.3	57,823	8.07
1995	39,013	7.3	57,040	8.3	66,164	9.1	68,243	9.20
1996	41,862	7.3	62,854	10.2	68,164	3.0	69,843	2.3
1997	43,129	3.0	64,346	2.4	69,543	2.0	71,568	2.5
1998	37,852	-12.2	54,399	-15.5	57,380	-17.5	58,847	-17.8
1999	39,362	4.0	55,294	1.6	57,215	-0.3	60,200	2.3
2000	40,941	4.0	57,595	4.2	59,492	4.0	63,149	4.9
2001	42,305	3.3	59,493	3.3	61,192	2.9	65,512	3.7

Sumber Data : BPS, PDRB Propinsi - Propinsi Di Indonesia berbagai edisi, diolah

Menurut dokumen Repelitada V Propinsi Jawa Tengah bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan di Jawa Tengah rata-rata sebesar 7 % per tahun atau membutuhkan dana investasi sejumlah Rp. 63,18 trilliun . Dana investasi tersebut terdiri dari dana investasi masyarakat yang diperkirakan Rp. 48,13 trilliun dan investasi Pemerintah yang diperkirakan sebesar Rp. 15.05 trilliun.

Upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah terus dilakukan salah satunya dengan memberikan kesempatan bagi Investor Asing maupun Domestik

untuk menanamkan modalnya di Jawa Tengah . Data Penanaman Modal yang dilakukan oleh pihak Asing maupun Domestik dapat didekati dengan nilai PMA dan PMDN yang telah mendapatkan surat persetujuan tetap dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2.
Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) Yang Telah Mendapat Persetujuan Tetap (SPT) Di Jawa Tengah Tahun 1980 -2001 (dalam jutaan)

Tahun	PMDN (Rp)	Pertumb. (%)	PMA		Pertumb. (%)	Tabungan (Rp)
			(US \$)	(Rp)		
1980	165,028		180.8	70,269,390		26,429
1981	193,292	17	180.8	89,859,893	28	37,758
1982	433,156	124	183.2	105,862,160	18	47,380
1983	172,780	-60	191.2	185,828,300	76	59,861
1984	582,175	237	236.2	224,183,524	21	71,719
1985	697,361	20	251.9	243,126,546	8	100,877
1986	737,795	6	261.6	425,766,955	75	152,061
1987	848,629	15	288.7	453,322,016	6	190,110
1988	1,076,869	27	362.0	637,905,905	41	246,828
1989	789,500	-27	362.0	999,894,190	57	527,766
1990	659,778	-16	1,514.8	1,143,599,778	14	894,570
1991	695,397	5	104.1	1,376,394,312	20	1,293,853
1992	1,370,565	97	252.1	1,794,185,378	30	2,114,786
1993	2,984,208	118	96.4	2,071,682,400	15	2,912,877
1994	6,729,769	126	1,833.5	2,653,037,200	28	3,388,371
1995	5,432,795	-19	717.6	2,853,943,552	8	4,047,692
1996	4,508,586	-17	3,399.5	3,023,502,740	6	5,057,974
1997	7,406,630	64	2,221.5	1,032,997,500	-66	5,660,218
1998	2,482,396	-66	3,073.2	2,466,243,000	139	5,649,715
1999	1,038,689	-58	127.9	90,738,000	-96	10,595,068
2000	2,451,203	136	72.1	100,692,696	11	12,698,430
2001	3,211,218	31	96.7	69,153,496	-31	14,880,518

Sumber Data : Biro Pusat Statistik, Diolah

Pada periode tahun 1984 sampai dengan 1988 nilai Investasi PMDN yang telah mendapatkan surat persetujuan tetap di Jawa Tengah mampu tumbuh positif. Selanjutnya dapat dilihat bahwa pada tahun 1984 nilai Investasi PMDN yang telah mendapatkan persetujuan tetap (SPT) melonjak dari Rp. 172.180.000.000 pada tahun

1983 menjadi Rp. 582.175.000.000 ,- pada tahun 1984 atau tumbuh 237 %, hingga sampai dengan tahun 1988 mampu tumbuh positif dan tetap di atas 10 % , tetapi pada tahun 1989 dan 1990 pertumbuhannya menjadi negatif namun pada tahun 1994 mampu tumbuh positif lagi . Nilai Penanaman Modal Asing (PMA) yang telah mendapatkan persetujuan tetap (SPT) pada periode tahun 1980 – 1996 selalu mengalami pertumbuhan yang positif , meskipun pertumbuhannya mengalami fluktuasi. Selama periode tersebut Pertumbuhan PMA di Jawa Tengah sangat tinggi yaitu di atas 10 % , hanya pada tahun 1985, 1986, 1995 dan 1996 pertumbuhannya di bawah 10 %.

Upaya lain adalah dengan menggalang sumber dana dari masyarakat melalui tabungan . Tabungan yang berhasil digalang dari masyarakat Jawa Tengah nilainya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Terlihat pada tabel 1.1. bahwa pada tahun 1980 sebesar Rp. 26.429.000.000 menjadi Rp. 5.057.900.000.000 ,- pada tahun 1996

Sedangkan kegiatan ekspor diharapkan dapat memberikan efek yang positif ke atas kegiatan ekonomi , karena merupakan pengeluaran penduduk ke atas barang-barang yang dihasilkan . Sebaliknya impor menimbulkan efek yang sebaliknya yaitu pengeluaran ke atas barang impor meningkat. Ini berarti pendapatan yang diterima telah dibelanjakan untuk memberi barang yang diproduksi di negara-negara lain (daerah lain) dan mengurangi perbelanjaan ke atas barang-barang dalam negeri (Sukirno, 2000)

Kegiatan ekspor barang Propinsi Jawa Tengah secara umum terus mengalami peningkatan, meskipun pertumbuhannya mengalami fluktuasi. Hanya pada tahun 1982 dan 1989 kegiatan ekspor barang Jawa Tengah mengalami pertumbuhan yang negatif, seperti terlihat pada tabel 1.3. Sedangkan Jawa Tengah ternyata belum mampu mengurangi impor barang, sehingga pertumbuhannya semakin meningkat terus.

Tabel 1.3.
Nilai Ekspor dan Impor Barang di Jawa Tengah tahun 1980 - 2001
 (dalam jutaan)

Tahun	Ekspor		Pertumb. (%)	Impor		Pertumb. (%)
	(US \$)	(Rp)		(US \$)	(Rp)	
1980	100.8	63,992.0		52.9	33,599	
1981	100.0	64,300.0	0.481	80.8	51,951	54.62
1982	910.0	62,972.0	-2.065	139.6	96,593	85.93
1983	133.0	132,202.0	109.938	457.7	454,963	371.01
1984	362.7	390,281.6	195.216	196.8	211,821	-53.44
1985	394.1	445,719.2	14.205	148.3	167,769	-20.80
1986	372.3	616,189.9	38.246	56.0	92,713	-44.74
1987	410.8	678,612.3	10.130	12.5	20,636	-77.74
1988	637.4	1,101,993.7	62.389	15.2	26,291	27.40
1989	474.0	855,570.0	-22.362	25.9	46,906	78.41
1990	598.6	1,137,938.6	33.004	86.2	163,932	249.49
1991	608.5	1,212,063.9	6.514	166.5	331,715	102.35
1992	631.9	1,303,113.4	7.512	792.0	1,633,147	392.33
1993	800.5	1,688,984.7	29.611	847.5	1,788,208	9.49
1994	950.9	2,092,125.7	23.869	956.0	2,104,082	17.66
1995	940.3	2,170,143.2	3.729	1,545.0	3,566,818	69.52
1996	1,307.6	3,116,010.8	43.585	1,837.5	4,378,762.5	22.764
1997	1,624.4	7,553,460.0	142.408	2,014.4	4,800,315.2	9.627
1998	1,613.2	12,945,930.0	71.391	1,717.9	4,093,755.7	-14.719
1999	1,398.8	9,931,480.0	-23.285	1,514.7	3,609,530.1	-11.828
2000	2,096.8	2,011,941.0	-79.742	2,921.7	2,803,115.0	-22.341
2001	1,972.5	2,051,442.0	1.963	2,925.1	3,042,106.0	8.526

Sumber data : Biro Pusat Statistik, diolah

Kebijakan pada Pemerintah Orde Baru yang bersifat sentralistik ternyata mempunyai dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah baik pada saat pertumbuhan tinggi maupun pada saat merosotnya perekonomian. Fenomena pertumbuhan PDRB Jawa Tengah selama Pemerintahan Orde Baru pada awalnya mengalami kenaikan sangat tinggi dan puncaknya pada tahun 1991 mencapai 9,6 %, yang kemudian mengalami penurunan kembali.

Tetapi pada tahun 1997 Indonesia mengalami krisis ekonomi. Kondisi demikian berdampak pada perekonomian Jawa Tengah sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi tumbuh negatif (-12 %). Krisis juga berakibat pada kegiatan Investasi terutama PMA dan PMDN yang mengalami kemerosotan yang sangat tajam dengan pertumbuhan yang negatif. Demikian juga dengan kegiatan ekspor Jawa Tengah yang mengalami pertumbuhan negatif.

Kondisi demikian sangat menarik untuk diadakan penelitian tentang Produk Domestik Regional Bruto Jawa Tengah berdasar faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian mengenai PDRB telah banyak dilakukan tetapi penelitian dengan memasukkan variabel krisis ekonomi belum banyak dilakukan.

1. 2. Perumusan Masalah

Pertumbuhan ekonomi masih menjadi tujuan utama pembangunan Indonesia dan masih menjadi indikator yang sangat penting untuk menilai keberhasilan suatu pembangunan melalui besarnya nilai PDB untuk suatu negara dan PDRB untuk suatu wilayah/daerah . Pada masa Pemerintah Orde Baru yang bersifat sentralistik,

Indonesia dianggap sebagai negara yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat yaitu rata-rata 6,82 %. sedangkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dapat menyamai pertumbuhan ekonomi Nasional.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi PDRB telah banyak dilakukan , tetapi penelitian yang memasukkan kondisi krisis ekonomi belum banyak diteliti. Sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi PDRB baik pada saat tidak krisis ekonomi maupun krisis ekonomi perlu untuk diadakan penelitian . Penelitian ini dilakukan berdasar dari latar belakang bahwa pada periode tahun tahun 1980 – 1996 nilai PDRB Jawa Tengah mengalami fluktuasi dan masih di bawah Propinsi – Propinsi di Pulau Jawa serta pada tahun 1997 terjadi krisis ekonomi menyebabkan pertumbuhan ekonomi mengalami kemerosotan yang sangat tajam hingga tumbuh negatif

1. 3. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

Sesuai dengan latar belakang permasalahan dan rumusan permasalahan penelitian ini dilaksanakan bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis Produk Domestik Regional Bruto Jawa Tengah berdasar faktor-faktor yang mempengaruhinya .
2. Untuk menganalisis pengaruh krisis ekonomi terhadap PDRB Jawa Tengah

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menambah referensi pada bidang ekonomi yang berkaitan dengan PDRB di Jawa Tengah.
2. Memberikan informasi/merupakan stimulan bagi pihak lain untuk mengadakan penelitian lebih lanjut.
3. Menambah perbendaharaan bagi toeritisi maupun pengambil kebijakan dalam pembangunan ekonomi .

BAB II.
TINJAUAN PUSTAKA DAN
KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

2. 1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Landasan Teori

2.1.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi disuatu wilayah/Propinsi dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi seluruh wilayah (BPS, 1998).

PDRB atas harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tiap tahun, sedang PDRB atas harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan pada tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas harga berlaku digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur , sedang harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Menghitung angka-angka PDRB menggunakan tiga pendekatan (Dumairy,1999) yaitu :

1. *Menurut Pendekatan Produksi*, PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi yang berada di suatu wilayah/propinsi dalam jangka tertentu.
2. *Menurut Pendekatan Pendapatan*, PDRB merupakan balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi suatu wilayah dalam waktu tertentu. Dalam definisi ini PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung netto.
3. *Menurut Pendekatan Pengeluaran*, PDRB adalah semua komponen pengeluaran akhir seperti ; (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, (2) konsumsi Pemerintah, (3) pembentukan modal tetap bruto, (4) Perubahan Stock dan (5) ekspor netto dalam jangka waktu tertentu.

Ketiga konsep pendekatan tersebut memberikan jumlah yang sama antara jumlah pengeluaran dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksinya . Selanjutnya PDRB atas dasar harga pasar mencakup komponen pajak tidak langsung.

PDRB dapat diturunkan menjadi ukuran-ukuran penting antara lain :

1. *Produk Regional Bruto*, merupakan produk domestik regional bruto ditambah dengan pendapatan netto dari luar propinsi. Pendapatan netto ini sendiri merupakan pendapatan atas faktor produksi (tenaga kerja dan modal) milik penduduk suatu propinsi yang diterima dari luar propinsi dikurangi pendapatan milik propinsi lain/asing yang diperoleh di propinsi tersebut.

2. *Produk Regional Neto*, merupakan produk regional bruto dikurangi dengan seluruh penyusutan atas barang-barang modal tetap yang digunakan dalam proses produksi selama setahun.
3. *Produk Regional Neto atas dasar biaya faktor produksi*, adalah produk regional neto atas dasar harga pasar dikurangi dengan pajak tidak langsung neto. Pajak tidak langsung neto merupakan pajak tidak langsung yang dipungut pemerintah dikurangi dengan subsidi pemerintah. Pajak tidak langsung maupun subsidi, kedua-duanya dikenakan terhadap barang dan jasa yang diproduksi atau dijual. Pajak tidak langsung bersifat menaikan harga jual sedangkan subsidi sebaliknya. Selanjutnya produksi disebut sebagai Pendapatan Regional.
4. *Pendapatan Regional*, adalah produk Domestik Regional Neto atas dasar biaya faktor tambahan pendapatan neto dari luar wilayah.

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Bruto(PDB) atau PNB (PDRB pada suatu wilayah atau propinsi) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak.

Tingkat pertumbuhan ekonomi mengukur pertambahan pendapatan nasional riil, yaitu pendapatan nasional yang dihitung pada harga konstan yang ditunjukkan oleh pertumbuhan dalam Gross Domestik Product, sedangkan untuk regional/daerah ditunjukkan Produk Domestik Regional Bruto. Perbedaan pokok antara analisa

pertumbuhan perekonomian nasional dan analisa pertumbuhan daerah adalah bahwa dititikberatkan pada perpindahan faktor (*factor movements*) (Richardson, 1971).

Dasar perhitungan pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Bruto atau Produk Nasional Bruto atau Produk Nasional , meskipun hasilnya berbeda ketiganya tetap sah dijadikan dasar perhitungan (Dumairy, 1999) , tetapi besaran yang dijadikan dasar adalah dihitung harus berdasarkan harga konstan tahun tertentu (nilai riil), bukan menurut harga berlaku (nilai nominal) .

Tingkat pertumbuhan ekonomi dalam suatu tahun tertentu (tahun t) dapat ditentukan dengan menggunakan formula :

$$g_t = \frac{Y_t^r - Y_{t-1}^r}{Y_{t-1}^r} \times 100 \% \dots\dots\dots (2.1.)$$

g_t = tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun t yang dinyatakan %

Y_t^r = pendapatan nasional (reginonal) riil pada tahun t

Y_{t-1}^r = pendapatan nasional (reginonal) riil pada tahun sebelumnya

2.1.1.2. Model Pertumbuhan Ekonomi Harrod Domar

Model Harod-Domar merupakan perluasan dari analisis Keynes mengenai kegiatan ekonomi secara nasional dan tenaga kerja. Harrod-Domar menganalisis syarat-syarat yang diperlukan agar perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang yaitu agar perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dengan mantap (*steady growth*).

Model pertumbuhan Harrod-Domar dibangun berdasarkan pengalaman negara maju. Harrod-Domar memberikan peranan kunci kepada investasi di dalam proses pertumbuhan ekonomi, khususnya mengenai watak ganda yang dimiliki investasi. *Pertama*, investasi menciptakan pendapatan yang merupakan dampak dari penawaran, dan kedua, investasi memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stock modal yang merupakan dampak dari penawaran.

Domar membangun modelnya berkaitan karena investasi disatu pihak menghasilkan pendapatan dan di pihak lain menaikan produksi, maka pada laju berapakah investasi harus meningkat agar kenaikan pendapatan sama dengan kenaikan di dalam kapasitas produksi, sehingga pekerjaan penuh dapat dipertahankan. Maksud kajian Domar ialah untuk menentukan laju pertumbuhan investasi yang diperlukan agar dapat di pertahankan keadaan $\bar{Y} = Y$: (Soemitro , 1994)

Harrod menunjukkan dalam modelnya bagaimana pertumbuhan mantap (ekuilibrium) dapat terjadi dalam perekonomian. Sekali laju pertumbuhan mantap terganggu dan perekonomian jatuh dalam dis-ekuilibrium, kekuatan-kekuatan kumulatif cenderung mengabaikan perbedaaan tersebut yang selanjutnya akan membawanya ke deflasi jangka panjang atau inflasi jangka panjang.

Teori Harrod mengungkapkan bahwa disamping *warranted rate of growth* (pertumbuhan yang diinginkan) juga diungkapkan adanya *natural rate of growth* (pertumbuhan yang alamiah) yang ditentukan oleh faktor-faktor obyektif struktural (terlepas dari perkiraan dan beberapa pihak para investor). Faktor-faktor tersebut

sebagai kondisi dasar (*fundamental conditions*) yang menyangkut angkatan kerja yang bertambah dan produktivitas kerja yang meningkat (karena faktor teknologi). Faktor-faktor yang menentukan *warranted rate of growth* berlainan dan terlepas (independen) dari faktor-faktor yang menentukan *natural rate of growth*.

Sumbangan Harrod yang penting dari teori dinamika pertumbuhan ialah bahwa tambahan modal (investasi neto) dalam suatu periode t menjadi sumber dasar bagi bertambahnya hasil produksi di periode tertentu $(t + 1)$. Investasi pada saat ini meningkatkan kemampuan berproduksi dan menambah pendapatan di masa datang. Kenaikan pendapatan dalam periode mendatang itu $(t+1)$ melalui asas akselerasi juga akan meningkatkan investasi yang hendak dilaksanakan oleh investor dalam periode yang bersangkutan dan seterusnya (Jhingan, 1999).

Untuk mencapai pertumbuhan mantap (*steady growth*), kedua macam input tersebut harus memenuhi syarat – syarat keseimbangan, (yaitu $g = k = n$, dimana $g =$ tingkat pertumbuhan output dan $k =$ tingkat pertumbuhan modal). Dalam keseimbangan, tabungan-tabungan direncanakan harus terus-menerus sama dengan investasi direncanakan. Jadi, berkenaan dengan k kita dapat merumuskan :

$$\frac{I}{K} = \frac{S}{K} = \frac{S}{Y} \cdot \frac{Y}{K} = \frac{s}{v} \dots\dots\dots (2.2.)$$

Dimana v adalah rasio modal-output . Pertumbuhan mantap memerlukan terpenuhinya syarat bahwa $g = n = s/v$, karena s , v dan n semuanya ditentukan secara independen, maka pertumbuhan mantap hanya dapat tercapai secara kebetulan saja.

Model pertumbuhan Horrod-Domar dapat untuk mengetahui taktik yang paling mendasar bagi pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan hanya dengan cara meningkatkan bagian dari pendapatan nasional untuk ditabung (yaitu memperbesar bagian pendapatan nasional yang tidak dikonsumsi)(Todaro,1999).

Daerah-daerah akan bertumbuh semakin cepat apabila hasrat menabung tabungan semakin tinggi dan apabila rasio modal-output semakin rendah. Impor modal netto adalah tambahan kepada tabungan kepada tabungan total suatu daerah.

Jika daerah-daerah yang bertumbuh-cepat tidak mempunyai tingkat tabungan yang sangat tinggi dan tingkat pertumbuhan alamiah yang tinggi, maka menurut prediksi dari Horrod-Domar daerah-daerah tersebut akan cenderung untuk mengimpor modal dan tenaga kerja (Richardson, 1971).

Guna mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, diperlukan adanya enam strategi dalam kebijakan makro. *Pertama*, mengendalikan anggaran pemerintah. Anggaran belanja tidak perlu dibuat berimbang, tetapi yang penting kalau sampai terjadi defisit tidak sampai mengganggu. *Kedua*, menekan laju inflasi di bawah pengawasan yang beralasan kuat dan masuk akal. *Ketiga*, membuat suatu sistem perpajakan yang sederhana, yang sejauh mungkin tidak menimbulkan distorsi dalam pengalokasian sumber daya ekonomi. Dalam hal ini menunjuk pajak nilai tambah (*value added tax*) sebagai bentuk yang terbaik. *Keempat*, menghindari pengenaan pajak dengan tingkat tinggi, karena justru itu akan menjadi disinsentif (insentif negatif) bagi aktivitas ekonomi. *Kelima*, menghindari penggunaan penerimaan pajak yang berlebihan hanya suatu tujuan atau kegiatan tertentu. *Keenam*, membuat suatu

batasan dan sekaligus rincian yang jelas terhadap keberadaan sektor pemerintah dan sektor swasta. Tetapi bila keduanya saling bertabrakan dan bersaing dalam bidang atau aktivitas ekonomi yang sama, hendaknya diterapkan suatu perlakuan atau peraturan suatu perlakuan atau peraturan yang sama (Prasetiantono, 1990)

Model pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar telah banyak dijadikan dasar oleh banyak pemikir untuk menyusun model pertumbuhan ekonomi, diantaranya oleh Rana-Dowling yang kemudian dikembangkan oleh Alkadri (1999). Model yang dikembangkan Alkadri (1999) tersebut dipergunakan untuk menelusuri sumber-sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia. Model persamaannya adalah sebagai berikut :

$$PE_t = a_0 + a_1UP_t + a_2US_t + a_3IA_t + a_4ID_t + a_5EK_t + a_6IM_t + a_7TP_t + a_8TS_t + a_9PJ_t + a_{10}PP_t + a_{11}TK_t + u_t \quad \dots \dots \dots (2.3.)$$

Keterangan: PE = tingkat pertumbuhan ekonomi; UP = aliran neto utang luar negeri pemerintah; US = aliran neto utang luar negeri swasta; IA = realisasi investasi swasta asing; ID = investasi swasta domestik yang disetujui; EK = ekspor barang; IM = impor barang; TP = tabungan pemerintah; TS = tabungan swasta; PJ = penerimaan pajak; PP = pengeluaran pemerintah; TK = tingkat pertumbuhan angkatan kerja ; u = variabel pengganggu (error terms); a_i = intersep dan parameter; t = menunjukkan periode waktu ke-t . Kecuali variabel PE dan TK, variabel-variabel lainnya (UP, US, IA, ID, EK, IM, TP, TS, PJ, dan PP) merupakan persentase dari PDB.

Model empiris pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dikembangkan oleh Alkadri tersebut (persamaan 2.1) dijadikan acuan untuk menyusun model dalam menganalisis faktor- faktor yang mempengaruhi PDRB Jawa Tengah dengan Variabel yang diestimasi disesuaikan dengan variabel yang tersedia .

Model dasar untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi PDRB Jawa Tengah berdasarkan fungsi persamaan sebagai berikut :

$$\text{PDRB} = f(\text{IA}, \text{ID}, \text{EK}, \text{IM}, \text{Tab}, \text{AK}, \text{Pj}) \dots\dots\dots (2.4.)$$

Keterangan :

PDRB	= Nilai Produk Domestik Regional Bruto (Rp)
IA	= Nilai realisasi PMA (Rp)
ID	= Nilai realisasi PMDN (Rp)
EK	= Nilai ekspor barang (Rp)
IM	= Nilai impor barang (Rp)
Pj	= Nilai total Pajak (Rp)
AK	= angkatan kerja (orang)
Tab	= Tabungan Masyarakat (Rp)

2.1.1.3. Investasi

Teori ekonomi mengartikan atau mendefinisikan investasi sebagai pengeluaran- pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan- peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang- barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan. Investasi berarti kegiatan perbelanjaan untuk meningkatkan kapasitas produksi suatu perekonomian. Investasi dapat dilakukan baik oleh swasta maupun Pemerintah (Sukirno, 2000).

Jamaluddin (1998) mengungkapkan bahwa ada teori utama berkaitan dengan Investasi dalam Pembangunan yaitu :1) teori dorongan kuat (*big push*), 2) teori pembangunan seimbang (*balanced development*), dan 3) teori pembangunan tidak seimbang (*un-balancing development*).

Menurut teori Keynes investasi tergantung pada suku bunga. Hal ini didasarkan pada pemikiran akana adanya harapan hasil netto yang akan diperoleh dimasa mendatang

(*future net return*). Makin tinggi suku bunga, makin tinggi pula biaya meminjam (*cost of borrowing*) untuk membiayai investasi, sehingga tingkat keuntungan yang diperoleh menurun, akhirnya pada tingkat tertentu investasi akan menurun.

Menurut Harrod-Domar, pengeluaran investasi tidak hanya mempunyai pengaruh terhadap permintaan agregate (melalui proses multiplier) tetapi juga terhadap penawaran agregate melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi. Dalam jangka panjang, investasi menambah stock kapital (misalnya pabrik-pabrik dan jalan-jalan). Penanamann modal (investasi) didefinisikan sebagai penambahan dari stock kapital (K) yang ditunjukkan oleh $\delta K, I = \delta K$

Pertumbuhan Harrod-Domar yang memberikan peranan kunci investasi adalah karena watak ganda yang dimilikinya oleh investasi (Maknun, 1995) yaitu :

- 1) Investasi dapat menciptakan pendapatan sebagai dampak permintaan investasi ;
- 2) Investasi dapat memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stock modal, sebagai dampak penawaran investasi.

Pada model pertumbuhan Harrod-Domar disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat efisiensi investasi, semakin tinggi pula sumbangannya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya semakin rendah efisiensi, makin turun tingkat pertumbuhan ekonominya (Soekarno, 1990).

Investasi merupakan salah satu mesin penggerak pertumbuhan ekonomi. Pada perekonomian tertutup, sumber dana investasi semata-mata berasal dari tabungan domestik. Perekonomian terbuka sumber dana dapat diperoleh melalui Pinjaman Luar Negeri. Pengalaman beberapa negara faktor utama penggerak pertumbuhan ekonomi

adalah akumulasi investasi di bidang industri, khususnya investasi yang dilakukan oleh pihak swasta (Mudrajat, 1997).

Investasi yang dilakukan oleh swasta salah satunya adalah investasi jangka panjang (umumnya lebih dari lima tahun) yang merupakan investasi pengadaan barang modal baik dalam rangka rehabilitasi/replacement, modernisasi/reconditioning, maupun pendirian proyek baru. Sedangkan alasan melakukan investasi antara lain : 1) penambahan fasilitas usaha produk baru (ekspansi), 2) peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja, 3) perluasan bidang usaha, baik horisontal maupun vertikal, 4) pemenuhan ketentuan Pemerintah seperti lingkungan lingkungan maupun ketentuan teknis seperti overhaul dan sebagainya. (Soekarno, 1990).

Menurut Hirschman (1958) investor akan melakukan investasi pada suatu lokasi didasarkan pada hubungan sektor-sektor ekonomi dan cara bekerja yang efisien. Ia melihat bahwa suatu industri akan saling tergantung dengan industri lain untuk dapat berkembang. Sehingga dalam setiap prosesnya ada yang disebut dengan "*Backward dan forward Linkage*"

Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan investasi yang sumber pembiayaannya dari luar negeri. Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan sesuatu yang dapat mengisi celah yang ada antara tabungan yang dapat dihimpun dari dalam negeri, cadangan devisa penerimaan pemerintah dan pengalihan skill di satu pihak dan jumlah yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran pembangunan di pihak lain (Sukirno, 1985).

Penanaman Modal Asing dapat terjadi dalam beberapa bentuk :1) penanaman modal keuangan murni; 2) usaha patungan, dan 3) anak perusahaan yang seluruhnya milik asing. Sedangkan manfaat yang diharapkan pada Penanaman Modal Asing adalah sebagai : 1) sumber modal; 2) sumber pengetahuan 3) sumber pembaharuan proses atau produk; 4) menciptakan kesempatan kerja; 5) pengaruh yang menguntungkan yang bersifat pelengkap.

Sesuai dengan pendapat Hirschman perlu pembangunan yang tidak seimbang (*leading sector*) bagi negara-negara sedang berkembang, umumnya menghadapi masalah kekurangan sumberdaya . Pembangunan tidak seimbang akan memunculkan gangguan-gangguan dan ketidakseimbangan dalam kegiatan ekonomi. Kondisi tersebut akan menjadi perangsang untuk melaksanakan investasi yang lebih baik pada masa yang akan datang (Lincoln Arsyad, 1999).

2.1.1.4. Tabungan

Peningkatan tabungan dan investasi akan mempercepat pertumbuhan ekonomi . Tabungan dalam perekonomian dapat dibedakan dua golongan : tabungan pemerintah dan tabungan masyarakat. Tabungan pemerintah diperoleh dari perbedaan diantara pendapatan pajak dengan pengeluaran pemerintah . Beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya seperti suku bunga, kestabilan ekonomi, kecepatan pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi dan efesiensi dan keteguhan lembaga-lembaga keuangan. (Sukirno, 2000).

Tabungan masyarakat merupakan merupakan akumulasi dari tabanas, taska dan Deposito berjangka . Tabungan ini dibutuhkan untuk membiayai investasi. Kesenjangan antara tabungan dengan investasi (*saving-investment gap*) ditutup dngan masuknya arus modal asing ke sektor pemerintah dan swasta (Mudrajat K., 1999).

Kerangka analisis yang dikembangkan oleh Keynes, dalam model pertumbuhan dianggap bahwa tabungan agregatif adalah fungsi dari pendapatan agregatif , $S = f(Y)$. Selanjutnya bahwa tingkat tabungan agregatif merupakan bagian proporsional dari tingkat pendapatan agregatif, hal yang dapat dirumuskan sebagai $S = sY$. Dalam rumus ini, s mencerminkan hasrat untuk menabung (*propensity to save*), baik dalam arti rata-rata (*average propensity to save*) maupun dalam arti marginal (*marginal propensity to save*).

Model pertumbuhan sering dibedakan antara bagian pendapatan yang bersumber pada upah tenaga kerja (*wage income*) dan bagian pendapatan yang bersumber dari pada laba (*profit income*). Fungsi tabungan dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$Y = W + P \dots\dots\dots (2.5.)$$

$$S = s_w W + s_p P \dots\dots\dots (2.6.)$$

Dimana : W = wage income dan p = profit, selanjutnya s_w = hasrat untuk menabung dari upah yang diterima, dan s_p = hasrat untuk menabung dari laba yang diterima.

Wihana K. dan Nurwandono (1992) berpendapat bahwa penelitian tentang pengaruh system keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi, terdapat empat aliran utama, yaitu model Keynes (1936), Toben (1965), Neo Strukturalis (1979) serta Mc.

Kinnon dan Shaw (1973), dimana model yang terakhir banyak digunakan oleh negara-negara berkembang.

Model pertumbuhan dengan uang dari Tobin menyimpulkan, bahwa dalam jangka panjang menengah, tingkat bunga riil yang tinggi akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Penganut Mc. Kinnon dan Shaw berpendapat bahwa tingkat bunga riil yang tinggi mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi baik jangka menengah maupun jangka pendek. Sedangkan Neo-Strukturalis berpendapat bahwa tingkat bunga riil yang tinggi sebagai akibat dari liberalisasi sector keuangan akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang rendah dalam jangka pendek, disertai dengan tingkat inflasi yang tinggi.

Kemudian Wihana K. dan Nurwandono (1992) mengembangkan model Fry (1988) yang telah diuji secara empiris di 14 negara sedang berkembang, dan sedikit dimodifikasi dengan model Zinser (1973) serta model Jung (1986).

2.1.1.5. Ekpor - Impor

Menurut Sukirno (2000) Ekspor akan memberikan efek yang positif ke atas kegiatan ekonomi negara karena merupakan pengeluaran penduduk negara lain ke atas barang-barang yang dihasilkan didalam negeri. Impor menimbulkan efek yang sebaliknya yaitu pengeluaran ke atas barang impor meningkat. Ini berarti pendapatan yang diterima telah dibelanjakan untuk memberi barang yang diproduksi di negara-negara lain dan mengurangi perbelanjaan ke atas barang-barang dalam negeri.

Menurut Aliman (2001) bahwa dalam teori ekonomi makro (*macro economic theory*) hubungan ekspor dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan atau pendapatan nasional merupakan suatu persamaan identitas, karena ekspor merupakan bagian dari tingkat pendapatan Nasional . Teori ekonomi pembangunan mengaitkan ke dua variabel tersebut sebagai kasus khusus yang menarik untuk dibahas, terutama dalam tatanan empiris. Perspektif teori ekonomi pembangunan masalah hubungan kedua variabel tersebut tidak tertuju pada masalah persamaan identitas itu sendiri, melainkan lebih tertuju pada masalah apakah suatu ekspor akan membuahkan kesejahteraan (kemakmuran) ataukah malah membawa suatu kesengsaraan.

Jung dan Marshall (1985) mengemukakan bahwa hubungan antara ekspor dan pertumbuhan ekonomi, setidaknya ada 4 (empat) pandangan yang masuk akal (*plansibel*) dan dapat diterima yaitu :

- 1) ekspor sebagai motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi;
- 2) ekspor merupakan penyebab turunnya pertumbuhan ekonomi;
- 3) ekspor bukannya motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi dalam negeri, tetapi malah sebaliknya pertumbuhan ekonomi dalam negeri merupakan penggerak bagi ekspor;
- 4) Pertumbuhan ekonomi faktor penyebab turunnya ekspor .

Telah banyak para ahli yang melakukan penelitian hubungan antara ekspor dengan pertumbuhan ekonomi. Ram (1985, 1987) menyimpulkan bahwa peranan ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi adalah positif. Serta pada penggunaan data series memberikan hasil yang lebih baik dari penggunaan data silang (*cross section*). Meskipun kebanyakan peneliti. Menurut Sheehey (1990) bahwa pengaruh pertumbuhan pangsa ekspor terhadap pertumbuhan PDB hanya penting pada negara-negara yang sudah lebih industrialis, tetapi kemudian kurang penting lagi seiring dengan perjalanan waktu. Sedangkan Love (1992) mempunyai pendapat bahwa ketidakstabilan ekspor menciptakan ketidakstabilan makro ekonomi jangka pendek.

Impor perlu dipertimbangkan dalam menentukan perbelanjaan agregat ke atas barang-barang dalam negeri karena barang-barang yang dihasilkan di dalam negeri mengandung barang impor. Perhitungan perbelanjaan agregat ke atas barang-barang yang dihasilkan di dalam negeri impor harus dikurangkan dari keseluruhan perbelanjaan agregat yang dilakukan dalam suatu negara. Keseluruhan perbelanjaan agregat yang dilakukan dalam suatu negara dapat dihitung dengan formula $\text{Perbelanjaan Agregat} = C + I + G + X$ akan tetapi dalam keseluruhan perbelanjaan agregat ini termasuk nilai impor. Perbelanjaan agregat ke atas barang-barang yang dihasilkan di dalam negeri adalah $\text{Perbelanjaan Agregat} = C + I + G + (X - M)$.

Impor sesuatu negara juga ditentukan oleh beberapa faktor yang menentukan ekspor, yaitu daya saing negara tersebut dan kurs valuta asingnya. Penentu impor yang utama adalah pendapatan masyarakat sesuatu negara, semakin tinggi pendapatan

masyarakat semakin banyak impor yang akan mereka lakukan . Berdasarkan kepada pertimbangan ini, fungsi impor adalah dinyatakan seperti dalam persamaan :

$$M = mY \dots\dots\dots (2.7.)$$

$$\text{Atau: } M = M_o + mY \dots\dots\dots (2.8.)$$

dimana M adalah nilai impor , M_o adalah impor otonom dan m adalah kecondongan mengimpor marginal yaitu persentasi dari tambahan pendapatan yang digunakan untuk membeli barang impor. Impor otonomi ditentukan oleh faktor-faktor diluar pendapatan nasional seperti kebijakan proteksi dan daya saing negara-negara lain di negara pengimpor.

2.1.1.6. Penerimaan Pajak

Penerimaan Pemerintah kita artikan dengan penerimaan Pemerintah dalam arti seluas-luasnya yaitu meliputi penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh Pemerintah, Pinjaman Pemerintah , mencetak uang dan sebagainya.

Setiap perekonomian akan mengutip pajak dan beberapa pungutan pemerintah yang lain. Salah satu tujuan dari pengutipan pajak tersebut adalah untuk mengenakan pembayaran ke atas jasa-jasa yang disediakan pemerintah seperti menyediakan infrastruktur , administrasi pemerintah dan aparat keamanan . Disamping itu bertujuan untuk menyeimbangkan pendapatan berbagai golongan masyarakat dan

daerah serta untuk mengumpulkan dana yang akan digunakan untuk mendorong pembangunan yang lebih cepat di masa mendatang.

Menurut Suparmoko (1992) yang dimaksud dengan pajak ialah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa yang secara langsung dapat ditunjuk. Sedangkan menurut Goeritno Mangkoesobroto (1999) bahwa pajak merupakan suatu pungutan yang dipaksakan oleh Pemerintah untuk berbagai tujuan, misalnya untuk membiayai penyediaan barang dan jasa publik, untuk mengatur perekonomian, mengatur konsumsi masyarakat.

Pajak disamping sebagai suatu penerimaan negara yang utama (fungsi budget) juga mempunyai fungsi lain yaitu sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi kegiatan-kegiatan swasta dalam perekonomian (fungsi pengatur). Sebagai alat anggaran (budgeting) pajak digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan dana guna membiayai kegiatan-kegiatan Pemerintah, terutama kegiatan-kegiatan rutin. Pajak dalam fungsinya sebagai pengatur (Regulator) dimaksudkan terutama untuk mengatur perekonomian guna menuju pada pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, mengadakan redistribusi pendapatan serta stabilitas ekonomi tetapi kemudian pengertian ini diperluas yaitu untuk mengatur kegiatan-kegiatan baik kegiatan produsen maupun konsumen dalam mencapai tujuannya masing-masing.

Pajak dapat berdampak pada perubahan perilaku individual masyarakat (rumah tangga) karena dapat menyebabkan jumlah yang digunakan oleh sektor rumah tangga akan turun.

Artinya pajak akan menyebabkan multiplier efek dengan perubahan pajak akan mempengaruhi pendapatan disposable kemudian akan berpengaruh pada konsumsi rumah tangga dan seterusnya mempengaruhi pengeluaran agregat dan pendapatan nasional.

Melalui sistem perpajakan Pemerintah dapat menghalangi dihasilkannya barang-barang tertentu yang diperkirakan akan mengganggu atau dianggap kurang penting oleh Pemerintah. Sebaliknya dengan meringankan beban pajak atau menghapus pajak Pemerintah dapat memajukan suatu kegiatan tertentu.

Sistem perpajakan yang terbaik dipandang dari sudut pandangan ilmu ekonomi adalah sistem perpajakan yang memiliki pengaruh-pengaruh ekonomi yang paling baik atau setidaknya memberikan pengaruh walaupun tidak baik adalah yang paling sedikit. Pengaruh Pajak terhadap perekonomian dapat dibedakan menjadi pengaruh pajak terhadap produksi dan distribusi dari produksi. Pengaruh pajak terhadap produksi antara lain pajak mempengaruhi berkurangnya kemampuan untuk mengadakan investasi, menabung dan bekerja (Suparmoko, 1992).

Mussgrave membedakan analisis incidents pajak menjadi 3 , yaitu :

- a. Insidens pajak anggaran berimbang (*balanced budget incidence*), yaitu pengaruh distributive suatu pajak terhadap pengeluaran pemerintah yang dibiayai dari penerimaan-penerimaan pajak dalam jumlah yang sama.
- b. Insidens pajak diferensial (*differential incident*), yang menganalisis pengaruh distribusi pendapatan suatu jenis pajak bila digantikan dengan jenis pajak lain untuk membiayai aktivitas pemerintah dalam jumlah yang sama.

- c. Insidens pajak absolut (*Absolute incidence*) yaitu melihat pengaruh suatu jenis pajak terhadap distribusi pendapatan masyarakat tanpa melihat efek distributive jenis-jenis pajak lainnya, atau efek distributive dari suatu program pemerintah (pengeluaran pemerintah).

Sedangkan menurut Sadono Sukirno (1999) menyatakan bahwa campur tangan Pemerintah dalam perekonomian menimbulkan 2 (dua) perubahan penting dalam proses penentuan keseimbangan pendapatan nasional yaitu (1) pungutan pajak yang dilakukan pemerintah akan mengurangi pengeluaran agregat melalui pengurangan ke atas konsumsi rumah tangga, sebaliknya (2) pajak memungkinkan Pemerintah melakukan perbelanjaan dan ini akan menentukan perbelanjaan agregat.

2.1.1.8. Angkatan Kerja

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor dinamika dalam perkembangan ekonomi jangka panjang, bersama dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber daya alam, dan kapasitas produksi yang terpasang dalam masyarakat yang bersangkutan. Keempat faktor dinamika itu harus dilihat dalam kaitan interaksinya atau dengan yang lainnya. Namun, diantaranya peranan sumber daya manusia mengambil tempat yang sentral.

Golongan yang lazim dianggap sebagai angkatan kerja dalam masyarakat negara berkembang ialah mereka yang termasuk tingkat usia 10 tahun sampai 64 tahun, belakangan lebih banyak digunakan tolok ukur antara 15 tahun sampai 60 tahun. Sehingga masih harus diperhitungkan tingkat partisipasi angkatan kerja menurut

usia. Hal itu satu sama lain berkenaan dengan kemampuan dan ketersediaannya untuk secara aktif mencari pekerjaan yang bersifat produktif.

Pertambahan penduduk dan angkatan kerja di satu pihak dan laju serta arah investasi di pihak lain mempengaruhi perluasan kesempatan kerja dan pengangguran. Bertambahnya angkatan kerja pada dirinya mempengaruhi tingkat upah nyata maupun pembagian pendapatan masyarakat. Selain itu pertambahan penduduk dan angkatan kerja serta tingkat fertilitas mempengaruhi tingkat tabungan dan tingkat investasi yang diperlukan oleh masyarakat yang sedang membangun. Satu sama lain tidak lepas dari pola pengeluaran konsumsi. Dimana pendapatan per kapitanya rendah dan tertekan, maka lebih banyak pengeluaran yang secara nisbi dilakukan untuk komponen kebutuhan pangan.

Pada hakikatnya perluasan kesempatan kerja dan penciptaan lapangan kerja produktif harus dilaksanakan dengan meluaskan landasan kegiatan ekonomi. Hal itu harus disertai dengan usaha meningkatkan produktivitas, baik dibidang kegiatan baru (modern) maupun dibidang tradisional. Peningkatan produktivitas harus diartikan sebagai kenaikan hasil produksi per unit yang diperoleh dari kombinasi semua sarana produksi yang digunakan dalam proses produksi (Sumitro, 1994).

Berdasarkan keyakinan bahwa perekonomian tidak akan menghadapi masalah kekurangan permintaan agregat, ahli-ahli ekonomi Klasik selanjutnya berkeyakinan bahwa tingkat kegiatan ekonomi ditentukan oleh kemampuan faktor-faktor produksi yang terdapat dalam perekonomian dalam menghasilkan barang dan jasa . Dalam suatu periode tertentu, misalnya setahun, tingkat teknologi dan jumlah

barang-barang modal dapat dianggap tetap jumlahnya. Dengan demikian pada dasarnya tingkat produksi nasional yang dapat diciptakan ditentukan oleh dua faktor yaitu : tingkat kesempatan kerja yang dicapai dalam perekonomian serta kemampuan tenaga kerja dan faktor-faktor produksi lain untuk menghasilkan barang dan jasa .

Untuk menentukan jumlah pekerja yang akan digunakan dalam kegiatan ekonomi, analisis mengenai pasaran tenaga kerja perlu dilakukan. Analisa Klasik adalah dilandaskan kepada sistem ekonomi yang bersifat pasar bebas yang bersifat pasaran persaingan sempurna.

Permintaan ke atas tenaga kerja merupakan permintaan tak langsung atau derived demand. Tenaga kerja dipekerjakan oleh perusahaan dengan tujuan untuk digunakan dalam menghasilkan barang-barang yang akan mereka jual. Permintaan ke atas tenaga kerja sangat ditentukan oleh sifat permintaan ke atas barang-barang yang diwujudkannya.

Analisis mengenai permintaan dan penawaran tenaga kerja merupakan analisis jangka pendek. Dalam periode seperti ini dianggap hanya tenaga kerja yang mengalami perubahan. Faktor produksi lain seperti modal dan teknologi dianggap tetap. Kegiatan memproduksi yang menganggap hanya satu faktor saja yang dapat mengalami perubahan, dipengaruhi oleh hukum hasil tambahan yang semakin berkurang. Setiap tambahan pekerja akan menghasilkan produksi yang lebih rendah dari tambahan produksi yang diciptakan oleh pekerja sebelumnya.

Tendensi terwujudnya keseimbangan di pasaran tenaga kerja merupakan alasan penting lain yang menyebabkan ahli-ahli ekonomi Klasik berkeyakinan bahwa tingkat kegiatan perekonomian akan selalu beroperasi pada kesempatan kerja penuh.

Faktor lain seperti teknologi dan keefisienan barang-barang modal yang tersedia penting peranannya dalam menentukan tingkat pendapatan nasional yang dapat diwujudkan. Walaupun jumlah tenaga kerja adalah sama, akan tetapi efisiensi barang modal dan tingkat teknologi yang digunakan adalah berbeda, maka tingkat pendapatan nasional yang dicapai juga akan berbeda. Untuk menyederhanakan analisis yang dibuat pada mulanya akan dimisalkan bahwa tidak terdapat perkembangan teknologi dan efisiensi barang modal adalah tetap. Berdasarkan kepada pemisalan ini dapat dibentuk satu fungsi produksi yang menerangkan hubungan diantara jumlah tenaga kerja yang digunakan dan jumlah produksi yang diciptakan (Sukirno, 2000).

Mengkaji Angkatan Kerja tidak dapat terlepas dengan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menyebabkan kebutuhan konsumsi lebih banyak daripada kebutuhan investasi. Sumberdaya yang ada hanya dialokasikan lebih banyak ke pertumbuhan tenaga kerja yang tinggi daripada disumbangkan untuk meningkatkan kapital kepada setiap tenaga kerja yang lambat di sektor-sektor modern dan peningkatan pengangguran. Dampak berikutnya adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menyebabkan ratio ketergantungan (*dependency ratio*) juga tinggi, yang akan mengurangi tingkat tabungan masyarakat. (Widarjono, 1999). Akhirnya jika pertumbuhan penduduk yang cepat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik. Hal ini akan mungkin juga terjadi pelarian modal ke luar negeri

(*capital flight*), sehingga akan mengurangi Investasi Asing dan pembangunan dalam negeri.

2.1.2. Hasil Studi Penelitian Terdahulu

Setelah dibagian sebelumnya diuraikan hubungan teoritis terkait dengan variabel yang akan diteliti, pada bagian ini akan dikemukakan hubungan empiris yang telah banyak dilakukan oleh Peneliti antara dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Ringkasan Hasil Studi Terdahulu Yang Terkait dengan Penelitian.

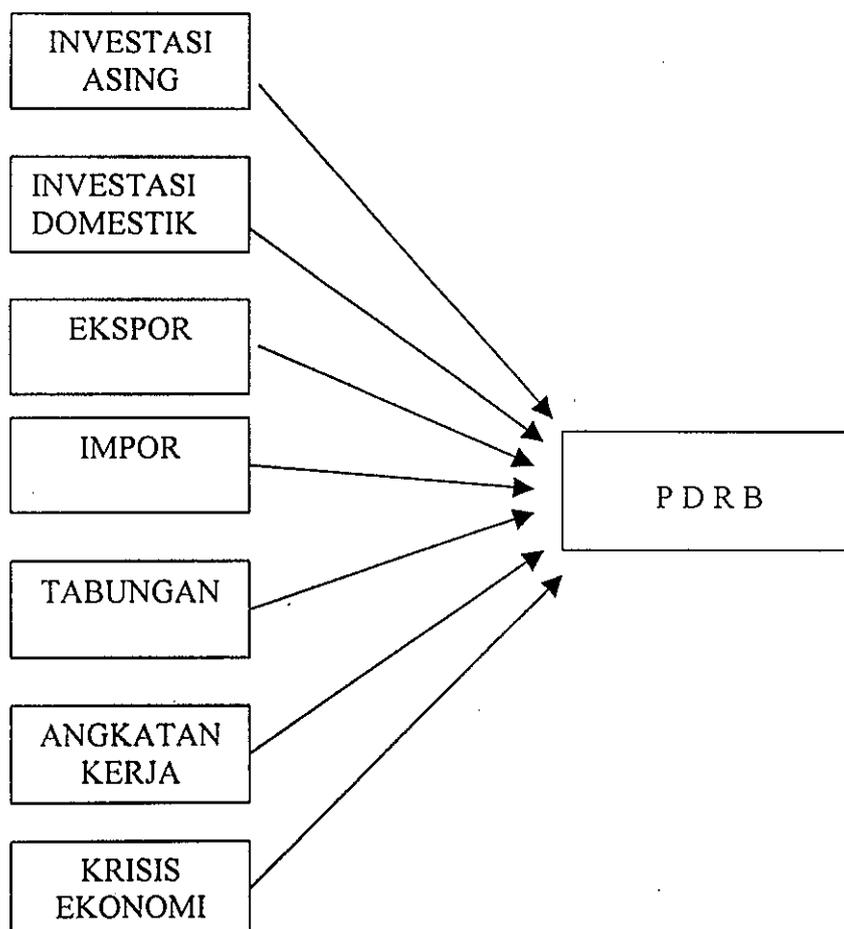
No.	Peneliti	Topik	Alat Analisis	Temuan
1.	Bambang Kustitu - anto dan Istikomah (1999)	Penanaman Modal Asing , terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia	Regresi dengan model dinamis (Error Correction Model)	Tabungan domestik mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan di Indonesia dalam jangka panjang, Investasi Asing tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka pendek maupun panjang.
2.	Fariad W. Mansoer dan Suyanto (1998)	Perilaku tabungan di negara-negara Asean	Regresi linear klasik dan analisis dinamis	Tabungan asing memberikan pengaruh negatif yang tidak signifikan bagi Indonesia
3.	Masdjidin Siregar (1999)	Kausalitas Ekspor dan PDB di Indonesia	Regresi Sederhana	Ekspor Indonesia hanya berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia selama 15 tahun pertama pembangunan, tetapi ekspor tidak berpengaruh positif apabila pembangunan telah lanjut.

No.	Peneliti	Topik	Alat Analisis	Temuan
4.	Aliman dan A Budi Purnomo (2001)	Kausalitas Antara Ekspor dan Pertumbuhan Ekonomi	Kausalitas Granger (Error Correction Model)	Ekspor secara keseluruhan dipandang dari kamata ekonomi nasional tidak efisien dalam menopang pembangunan Indonesia karena sangat tergantung pasar Internasional.
5.	Agus Widarjono (1999)	Kausalitas pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi	Vektor Autoregresif Model (VAM)	Pertumbuhan Penduduk mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan sebaliknya Pertumbuhan Ekonomi mempengaruhi Pertumbuhan Penduduk.
6	Neni Pancawati (2000)	Modal fisik, Angkatan Kerja, Modal Manusia, SDA.	Ordinary Least Square (OLS)	Gejala Peningkatan GDP disebabkan oleh peningkatan ratio kapital tenaga kerja paralel. Bila kapital terdistribusi secara merata dan terus meningkat pada setiap tenaga kerja akan memberikan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan output (GDP) dibanding menambah investasi baru. Pertumbuhan Penduduk memberikan tekanan negatif terhadap pertumbuhan output GDP
7.	Alkadri (1999)	Aliran neto hutang luar negeri Pemerintah dan swasta, Investasi asing, Investasi Domestik, Ekspor Barang, Impor Barang, Tabungan swasta, penerimaan pajak, Penge-luaran Pemerintah, tingkat pertumbuhan angka tan kerja	Ordinary Least Square dan pengujian validasi data stationer	Hutang Luar Negeri, Investasi Asing dan Pengeluaran Pemerintah tidak dapat diandalkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia Ekspor barang, tabungan Pemerintah, tabungan swasta, Investasi dalam negeri dan pajak menjadi kunci utama sumber pertum-

No.	Peneliti	Topik	Alat Analisis	Temuan
				bahan ekonomi Indonesia, Angkatan kerja mampu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia meskipun sangat kecil.

2.2. Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka pemikiran teoritis yang menjadi pijakan pada penelitian ini dapat digambarkan melalui bagan sebagaimana pada gambar 2.1.



Keterangan : dipetik dari Alkadri (1999), dengan modifikasi seperlunya, 2002

Dari kerangka pemikiran teoritis tersebut didapatkan persamaan fungsional sebagai berikut :

$$\text{PDRB} = f(\text{IA, ID, EK, IM, Tab, Pj, AK, D}) \dots \dots \dots (2.9)$$

Keterangan :

PDRB = Nilai Produk Domestik Regional Bruto (Rp)
 IA = Nilai Investasi Asing (Rp)
 ID = Nilai investasi Domestik (Rp)
 EK = Nilai ekspor barang (Rp)
 IM = Nilai impor barang (Rp)
 Tab = Tabungan masyarakat (Rp)
 Pj = Pajak (Rp)
 AK = Angkatan Kerja (orang)
 D = Dummy

2.3. Hipotesis

Dalam penelitian ini kami mengajukan suatu hipotesis adalah sebagai berikut :

1. Investasi Asing berpengaruh positif terhadap PDRB Jawa Tengah .
2. Investasi Domestik berpengaruh positif terhadap PDRB Jawa Tengah.
3. Tabungan masyarakat berpengaruh positif terhadap PDRB Jawa Tengah.
4. Ekspor barang berpengaruh positif terhadap PDRB Jawa Tengah.
5. Angkatan kerja berpengaruh positif terhadap PDRB Jawa Tengah.
6. Penerimaan Pajak berpengaruh negatif terhadap PDRB Jawa Tengah .
7. Impor barang berpengaruh negatif terhadap PDRB Jawa Tengah.
8. Krisis ekonomi berpengaruh negatif terhadap PDRB Jawa Tengah

BAB III.

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan data runtun waktu (time series) dari tahun 1980 sampai dengan tahun 2001. Data yang digunakan merupakan data sekunder yaitu:

1. Data Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Jawa Tengah
2. Data nilai Realisasi Penanaman Modal Asing di Wilayah Propinsi Jawa Tengah
3. Data nilai Penanaman Modal Dalam Negeri yang telah mendapatkan surat persetujuan tetap di Wilayah Propinsi Jawa Tengah
4. Data angkatan Kerja Propinsi Jawa Tengah
5. Data nilai Ekspor barang Propinsi Jawa Tengah
6. Data nilai Impor barang Propinsi Jawa Tengah
7. Data Penerimaan Pajak Propinsi Jawa Tengah
8. Data Tabungan Masyarakat Jawa Tengah

Sumber data diperoleh dari :

1. Biro Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah
2. Kantor Pajak Wilayah VIII Propinsi Jawa Tengah
3. Badan Penanaman Modal Propinsi Jawa Tengah
4. Bank Indonesia

3.2. Metode Pengumpulan Data

Data diperoleh dari sumber resmi yaitu publikasi, laporan dan dokumen-dokumen resmi lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan data tahunan mulai tahun 1980 sampai dengan tahun 2001.

3.3. Teknik Analisis

3.3.1. Spesifikasi Model

Model dalam penelitian ini merupakan modifikasi dari model yang dikembangkan oleh Alkadri (1999) untuk perekonomian Indonesia yang dengan penyesuaian variabel yang tersedia maka Model dasar penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$PDRB = f(IA, ID, EK, IM, Tab, Pj, AK,) \dots\dots\dots(3.1)$$

Keterangan :

PDRB	= Nilai Produk Domestik Regional Bruto (Rp)
IA	= Nilai Investasi Asing (Rp)
ID	= Nilai invstasi Domestik (Rp)
EK	= Nilai ekspor barang (Rp)
IM	= Nilai impor barang (Rp)
AK	= angkatan kerja (orang)
Pj	= Pajak (Rp)
Tab	= Tabungan (Rp)

Sehubungan dengan model dasar di muka, maka model yang dapat ditaksir adalah sebagai berikut :

$$\ln PDRB = a_0 + a_1 \ln IA + a_2 \ln ID + a_3 \ln EK + a_4 \ln IM + a_5 \ln Tab + a_6 \ln Pj + a_7 \ln AK + \mu \dots \dots \dots (3.2)$$

Keterangan :

$a_i, b_i, c_i, d_i, e_i, f_i$; intercept; parameter $\neq 0$
 μ = variable pengganggu (error term)
 \ln = logaritma natural

Guna menganalisis pengaruh krisis ekonomi terhadap PDRB Jawa Tengah maka memasukkan variabel Dummy , sehingga model yang dapat ditaksir adalah sebagai berikut :

$$\ln PDRB = a_0 + a_1 \ln IA + a_2 \ln ID + a_3 \ln EK + a_4 \ln IM + a_5 \ln Tab + a_6 \ln Pj + a_7 \ln AK + a_8 \text{ Dummy} + \mu \dots \dots \dots (3.3)$$

Keterangan :

Dummy :

D0 = 0 : tidak krisis ekonomi (periode tahun 1980 – 1996)
 D1 = 1 : krisis ekonomi (periode tahun 1997 – 2001)

3.3.2. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel-variabel penelitian dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Definisi Operasional Variabel

No.	Variabel	Notasi	Definisi	Satuan
1	PDRB	PDRB	pertambahan nilai tambah yang dihasilkan dalam suatu unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah pada tahun t, yang dihitung berdasarkan atas harga konstan	Rp
2	Investasi Asing	IA	nilai Penanaman Modal Asing yang telah mendapatkan surat persetujuan tetap di wilayah Jawa Tengah	Rp.
3.	Investasi Domestik	ID	nilai Penanaman Modal Dalam Negeri yang telah mendapatkan surat persetujuan tetap di wilayah Jawa Tengah	Rp.
4.	Ekspor barang	EK	nilai ekspor barang yaitu pengiriman barang-barang ke luar wilayah Jawa Tengah baik ke luar Negeri maupun ke luar Propinsi lain	Rp.
5.	Impor barang	IM	nilai impor barang yaitu kegiatan mendatangkan barang-barang dari luar wilayah Jawa Tengah baik berasal dari Luar Negeri	Rp.
6	Tabungan Masyarakat	Tab	Jumlah tabungan masyarakat Jawa Tengah	Rp.
7.	Penerimaan Pajak	Pj	Realisasi penerimaan pajak baik pajak langsung maupun pajak tidak langsung	Rp.

No.	Variabel	Notasi	Definisi	Satuan
8.	Angkatan Kerja	AK	jumlah penduduk yang termasuk kedalam angkatan kerja (berumur 10 ke- atas)	Orang

3.3.3. Prosedur Analisis

Prosedur Penelitian yaitu dengan melakukan estimasi dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square (OLS)*. Kemudian setiap parameter diestimasi diuji dengan menghitung nilai t statistiknya.

Tetapi terlebih dahulu melakukan Uji asumsi klasik sehingga akan mendapatkan kondisi *BLUE (Best, Linear, and Unbiased Estimation)*.

1. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah terjadinya hubungan linear diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi. Jika terjadi multikolinearitas sempurna maka penaksir OLS tak tertentu dan varian atau kesalahan standarnya tak tertentu. Jika kolinearitas tajam tetapi tidak sempurna maka konsekuensinya adalah :

- Meskipun penaksir OLS mungkin bisa diperoleh, kesalahan standarnya cenderung semakin besar dengan meningkatnya tingkat korelasi antara peningkatan variabel.
- Karena besarnya kesalahan standar, selang keyakinan untuk parameter populasi yang relevan cenderung lebih besar.

Menurut Gujarati (1995) untuk mengetahui terjadinya multikolinearitas dapat dideteksi dari :

- 1) Nilai R^2 tinggi (mendekati 1), tetapi tidak ada variabel bebas yang signifikan.
- 2) Cara regresi parsial antar variabel bebas, dimana bila nilai R^2 regresi parsial masing-masing variabel bebas lebih besar dari nilai R^2 model utama maka terjadi multikolinear. Jika ternyata terjadi multikolinearitas maka akan dilakukan langkah-langkah perbaikan sesuai teori yang lazim digunakan.

2. Heteroskedastisitas

Dimana varian tiap unsur disturbance μ_i tergantung pada nilai yang dipilih dari variabel yang menjelaskan, yaitu suatu angka konstan yang sama dengan σ^2 . Hal ini merupakan asumsi homoskedastisitas. Jika hal ini tidak dipenuhi disebut terjadi heteroskedastisitas. Jika terjadi heteroskedastik maka penaksir OLS tetap tak bias dan konsisten tetapi penaksir tadi tidak lagi efisien baik dalam sampel kecil maupun besar. Menurut Gujarati (1995) untuk menguji adanya heteroscedasticity akan dilakukan melalui uji Park . Uji ini terdapat 2 tahapan yaitu : pertama melaksanakan regresi OLS dengan tidak memandang persoalan heteroskedasitas dan didapatkan nilai e_i , kedua melakukan regresi sebagai berikut :

$$\text{Lne}_i^2 = \alpha + \beta \text{Ln } X_i + v_i$$

Jika nilai β signifikan secara statistik, maka data terdapat heteroskedastisitas, jika tidak signifikan maka asumsi homoskedastisitas dapat diterima.

3. Autokorelasi

Autokorelasi didefinisikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (dalam data deretan waktu) dan dalam data cross-sectional. Jika terjadi autokorelasi maka sama dengan kasus heteroskedastisitas, yaitu penaksir OLS tetap tak bias dan konsisten tetapi penaksir tadi tidak lagi efisien baik dalam sampel kecil maupun besar. Untuk mendeteksi terjadinya autokorelasi dilakukan melalui Durbin Watson d test, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Melakukan regresi OLS dan didapatkan residual e_i
- 2) Menghitung nilai d melalui rumus :

$$d = \frac{\sum_{t=2}^{t-1} (e_t - e_{t-1})^2}{\sum_{t=2}^{t-1} e_t^2}$$

- 3) Mencari nilai kritis d_L dan d_U sesuai ukuran sampel dan banyaknya variabel.
- 4) Jika $d > d_L$ atau $d^* - d < d_L$ maka tidak terjadi autokorelasi.

3.3.4. Justifikasi Statistik

Guna menguji signifikansi dari variabel –variabel yang diamati dapat dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t-tabelnya. Jika nilai t hitung lebih besar dari t tabel, maka variabel independen yang diamati secara statistik signifikan mempengaruhi variabel independennya. Melalui analisa dengan menggunakan aplikasi program Eviews-3 , taraf signifikansi dapat diketahui dari nilai probabilitas (p-values) nya. Hipotesis statistik (H_0) ditolak apabila p-values < atau = $\alpha : 5 \%$.

Untuk mengetahui metode yang baik untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi PDRB Jawa Tengah dapat dilihat dari masing-masing berdasarkan :

- 1) Jumlah variabel bebas yang signifikan
- 2) Nilai R^2 masing-masing model .
- 3) Nilai F ratio masing-masing model.
- 4) Kesesuaian tanda antara teoritis dengan empiris.

BAB IV. GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

4.1. Letak Geografi

Propinsi Jawa Tengah dengan luas 3.254 ribu ha merupakan 25,6 % dari luas Pulau Jawa dan Madura atau 1,69 % dari luas wilayah Indonesia, terletak di bagian tengah Pulau Jawa, yaitu diantara $108^{\circ}30'$ – $11^{\circ}30'$ Bujur Timur dan $5^{\circ}40'$ – $8^{\circ}30'$.

Di sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Propinsi Jawa Barat, di sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Jawa Timur, di sebelah Utara mulai dari Pulau yang paling Utara di gugusan Karimunjawa di batasi oleh Laut Jawa dan di sebelah Selatan dengan Samudera Hindia dan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta .Letak Geografis Jawa Tengah sangat strategis karena menduduki posisi antara Jawa Barat dan DKI Jakarta dengan Jawa Timur yang kesemuanya sangat pesat perkembangannya. Luas Jawa Tengah terdiri daari 1.008 ribu ha (30,99 %) tanah sawah dan 2.246 ribu ha (69,01 %) tanah kering dimana setiap tahunnya terjadi penurunan luas tanah sawah.

Semarang sebagai ibukota Propinsi Jawa Tengah pun terletak pada jalur ekonomis yang sangat kuat, yang menghubungkan kota Jakarta dengan Surabaya. Pelabuhan Tanjung Mas sebagai pelabuhan Samudra, kondisi geografis yang strategis ini akan lebih mudah untuk dimanfaatkan guna perkembangan daerah Jawa Tengah yang pada gilirannya akan menyumbang pula pada Pembangunan Nasional.

4.2. Kependudukan

Jumlah penduduk Jawa Tengah berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 1995, tercatat sebesar 29,94 juta jiwa atau sekitar 15 % dari jumlah penduduk Indonesia, dan menempati urutan ketiga dari seluruh Propinsi di Pulau Jawa. Jumlah penduduk perempuan lebih besar dibandingkan jumlah penduduk laki-laki, yaitu ditunjukkan oleh nilai sex rasio (rasio penduduk laki-laki terhadap perempuan) sebesar 971 .

Sejalan dengan pertumbuhan penduduk, jumlah rumah tangga juga bertambah, pada tahun 1991 tercatat 6,30 juta menjadi 6,58 juta pada tahun 1995 atau naik sebesar 4,33 %. Dalam kurun waktu yang sama, rata-rata besarnya anggota rumah tangga cenderung stabil yaitu 4,60 jiwa/KK.

Tabel 4.1. dapat dilihat bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang menyediakan lapangan pekerjaan yang paling besar di Jawa Tengah , yang kemudian diikuti oleh sektor perdagangan besar, eceran dan hotel. Sedangkan sektor listrik , gas dan air merupakan sektor yang paling sedikit memberikan lapangan pekerjaan.

Bertambahnya penduduk usia kerja (10 tahun keatas) dari 22.248.661 jiwa pada tahun 1990 menjadi 23.650.216 pada tahun 1995, membutuhkan perluasan kesempatan dan lapangan pekerjaan. Di Jawa Tengah telah terjadi pergeseran lapangan kerja dari sektor primer ke sektor tersier (sektor jasa/sektor informal) merupakan suatu peluang perluasan kesempatan kerja yang dapat menyerap pengangguran.

Tabel 4.1.
Penduduk Jawa Tengah Berumur 10 tahun Keatas Yang Bekerja
Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Dan Jenis Kelamin Tahun 1991 – 1995

No.	Lapangan Pekerjaan	1979	1980	1985	1993	1994	1995
1.	Pertanian	6.237.097	5.400.177	5.778.432	7.245.354	6.643.982	6.466.506
2.	Pertambangan	8.943	47.336	50.820	145.387	99.503	138.817
3.	Industri Pengolahan	1.001.592	1.191.985	1.394.799	1.702.484	1.785.917	1.881.367
4.	Listrik, Gas, dan Air	5.962	9.148	6.426	58.945	33.761	41.813
5.	Bangunan	149.046	344.369	434.427	506.191	578.543	670.068
6.	Perdagangan Besar, Eceran dan Hotel	1.236.092	1.433.316	1.900.596	2.262.267	2.341.113	2.415.213
7.	Angkutan, Pergudang-an dan Komunikasi	160.970	231.760	344.593	380.058	407.443	422.517
8.	Keuangan Asuransi, Jasa Perusahaan	14.905	31.463	33.094	65.092	64.023	65.413
9.	Jasa Kemasyarakatan	933.031	1.219.549	1.694.454	1.694.454	1.833.715	1.881.043
10.	Lainnya	188.792	59.080	80.499	80.499	62.929	79.299

Sumber Data : Jawa Tengah Dalam Angka berbagai edisi

Dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan memanfaatkan jumlah penduduk yang besar sebagai kekuatan pembangunan, maka perlu ditingkatkan usaha-usaha pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber daya manusia dengan meningkatkan pembangunan di berbagai bidang dan sektor. Kebijakan yang dilakukan Pemerintah Jawa Tengah dalam pelaksanaannya antara lain dengan mengutamakan pembangunan yang meningkatkan perluasan lapangan kerja, meningkatkan pengadaan pandangan dan mutu gizi, memperluas fasilitas dan memperbaiki mutu pendidikan dan latihan kerja serta meningkatkan pelayanan kesehatan.

4.3. Pembagian Wilayah Pembangunan

Secara administratif terbagi dalam 29 Kabupaten dan 6 Kota. Dengan memperhatikan perkembangan dan tingkat keeratan hubungan antar kegiatan yang ada , yang bertumpu pada pengembangan sumber daya alam dan manusia dengan tetap mempertimbangkan kemampuan daerah dalam segala hal termasuk pembiayaan, maka kebijaksanaan perwilayahan pembangunan Jawa Tengah menentukan menjadi 10 (sepuluh) Wilayah Pembangunan.

Penetapan perwilayahan ini berdasarkan potensi wilayah dan kedudukannya pada struktur ekonomi wilayah yang nyata berkembang sekarang dan diperhitungkan akan memberikan dorongan untuk mempercepat pertumbuhan masa mendatang. Ke 10 (sepuluh) Wilayah Pembangunan tersebut dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2.
Pembagian Wilayah Pembangunan Di Jawa Tengah

Wilayah Pembangunan	Pusat Wilayah Pengembangan	Kab/Kota
WP I	Kota Semarang.	Kota Semarang, Kota Saltiga, Kab. Semarang, Kab. Kendal , Kab. Demak, dan Kab. Grobogan
WP II	Kota Pekalongan.	Kota Pekalongan, Kab. Pekalongan, Kab. Batang dan Kab. Pemalang
WP III	Kota Tegal .	Kota Tegal, Kab. Tegal daan Kab. Brebes
WP IV	Kota Cilacap.	Kab. Cilacap
WP V	Kota Kebumen.	Kab. Kebumen

Wilayah Pembangunan	Pusat Wilayah Pengembangan	Kab/Kota
WP VI	Kota Purwokerto	Kab. Banyumas, Kab. Banjarnegara dan Kab. Purbalingga.
WP VII	Kota Magelang	Kota Magelang, Keb. Magelang, Kab. Temanggung, Kab. Wonosobo dan Kab. Purworejo
WP VIII	Kota Surakarta .	Kota Surakarta, Kab. Boyolali, Kab. Sukoharjo, Kab. Klaten, Kab. Sragen, Kab. Karanganyar, dan Kab. Wonogiri
WP IX	Kota Rembang	Kab. Blora dan Kab. Rembang
WP X	Kota Kudus	Kab. Jepara, Kab. Pati dan Kab. Kudus

Sumber Data : *Repelitada V. Jawa Tengah*

4.4. Ekonomi Daerah

Keadaan sosial ekonomi yang telah dicapai masyarakat Jawa Tengah dalam perkembangan pelaksanaan pembangunan di Daerah dapat dilihat dari besarnya Produk Domestik Regional Bruto. Dilihat dari segi lapangan usaha, sektor industri pengolahan telah menggeser peran dari sektor Pertanian.

Untuk itu proses industrialisasi lebih dimantapkan guna mendukung berkembangnya industri sebagai penggerak utama peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan dan perluasan lapangan kerja serta perluasan kesempatan berusaha, serta peningkatan devisa. Upaya lain adalah melalui keterkaitan industri hulu, antara dan hilir dengan tetap memperhatikan kelestarian

lingkungan. Kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB di Jawa Tengah Tahun

1994 – 1997 dapat dilihat paada tabel 4.3.

Tabel 4.3.
Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha
Atas Harga Konstan 1993 Propinsi Jawa Tengah 1993-2001
(Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha	1993		1995		1997		1999		2001	
	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
1. Pertanian	7.810.639,7	22,86	8.211.174,14	21,05	8.216.026,20	21,87	8.184.670,7	20,78	8.598.967,96	20,33
2. Pertambangan / Penggalian	407.614,4	1,20	471.646,19	1,21	587.426,67	1,14	575.612,9	1,46	642.027,09	1,52
3. Industri Pengolahan	10.234.268,1	30,12	12.260.155,08	31,43	13.709.740,32	32,02	12.036.861,7	30,55	12.819.594,90	30,30
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	228.414,7	0,67	304.154,62	0,78	393.556,61	0,74	450.221	1,14	509.108,39	1,20
5. Bangunan	1.604.770,6	4,72	1.808.178,57	4,64	2.139.684,09	4,34	1.626.238,4	4,13	1.693.045,33	4,00
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	6.802.665,8	20,02	8.337.892,12	21,37	9.612.930,14	21,08	9.026.900	22,91	10.092.087,9	23,86
7. Pengangkutan dan Komunikasi	1.278.563,6	3,76	1.510.647,54	3,87	1.766.846,11	3,84	1.946.926,9	4,94	2.219.896,6	5,25
8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	1.703.722	5,01	1.974.205,57	5,06	2.283.522,22	5,45	1.559.305,1	3,96	1.622.747,76	3,84
9. Jasa-jasa	3.908.248	11,50	4.135.898,81	10,60	4.420.088,54	9,53	734.072,8	10,12	4.107.700,47	9,71
Jumlah	33.978.909,2	100	39.013.952,64	100	43.129.820,9	100	39.394.513,7	100	42.305.176,40	100

Sumber Data : BPS, PDRB Jawa Tengah Berbagai Edisi, Diolah

Pada tabel 4.3. dapat dilihat bahwa sektor pertanian peranannya terus mengalami penurunan. Peranannya mulai diambil alih sektor Industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Meskipun demikian sektor Pertanian masih memberikan sumbangan lapangan kerja yang paling besar.

Kondisi demikian tidak lepas karena pengaruh dari ekonomi dunia dan nasional. Serta kebijaksanaan yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah. Kebijaksanaan yang terus ditempuh oleh Pemerintah Jawa Tengah antara lain :

1. Mengupayakan untuk memperbaiki struktur industri dan keterkaitannya serta upaya untuk mengembangkan ekspor komoditi industri dengan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi.
2. Meningkatkan peranan sektor industri melalui keterpaduan dengan sektor lainnya terutama sektior perdagangan baik di pusat maupun di daerah.
3. Mengatur dan mengembangkan kawasan industri dan wilayah industri khusus ekspor.

4.5. Perdagangan

Pasar berfungsi sebagai tempat yang penting dalam penyaluran barang. Sesuai dengan perkembangan pembangunan, saat ini banyak hadir pusat perbelanjaan modern, dimana konsumen bisa berbelanja lebih efisien. Jumlah pasar yang ada di Jawa Tengah mencapai 1.667 buah (1995). Jumlah pengusaha dalam periode 1991 – 1995 mengalami fluktuasi. Paada tahun 1995 jumlah perdagangan besar, menengah dan kecil berturut-turut sebesar 194 pengusaha, 1.425 pengusaha dan 8.227 pengusaha. Berdasarkan status hukum (PT, Koperasi, CV, Firma daamn Bdaan Usaha lain) tercatat sebanyak 11.834 pengusaha.

Peroleh devisa sektor Migas di Jawa Tengah cenderung menurun, telah memacu sektor tersebut untuk berkembang. Pada tahun 1995 volume ekspor non

migas telah mencapai 64 % dari total ekspor, dengan nilai sekitar 866 US \$. Uraian lebih rinci dari sektor pertanian mencapai 82,54 ribu ton dengan total nilai 88,82 juta US \$. Selanjutnya, Volume dan nilai ekspor sektor Industri tercatat sebesar 559,21 ribu ton dan 777,44 juta US \$. Volume dan nilai ekspor dapat dilihat pada tabel 4.4.

Tabel 4.4.
Volume dan Nilai Ekspor Jawa Tengah Menurut Sektor
Tahun 1991 – 1995

No.	Sektor	Volume (ton)	Nilai (US \$ 000)
1.	Pertanian Tanaman Pangan	55.719,77	18.710
2.	Peternakan	56,06	980
3.	Kehutanan	22.866,73	21.770
4.	Perikanan Darat/Laut	3.897,07	47.360
5.	Industri	559.206,15	777.440
6.	Pertambangan non migas	0	0
7.	Minyak dan gas	360.387,30	74.010
	Jumlah		
		1995	1.002.135,06
		1994	1.106.743,24
		1993	1.144.260,15
		1992	944.732,57
		1991	987.796,06
			940.270,00
			950.966,27
			800.466,71
			631.965,74
			608.465,85

Sumber data : Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 1996

Pada tabel 4.4. bahwa sektor Industri masih menduduki peringkat pertama yang kemudian diikuti berturut – turut sektor minyak dan gas, sektor pertanian tanaman pangan, sektor kehutanan, sektor perikanan darat/laut dan sektor peternakan. Upaya peningkatan ekspor terus dilakukan terutama diarahkan untuk meningkatkan

ekspor non migas. Penanganan ekspor yang telah dimulai dan terbatas pada komoditi tradisional terus dilakukan diversifikasi produk dengan komoditi industri terutama industri kecil, pertambangan, pertanian, kehutanan dan jasa/pariwisata. Komoditi ekspor yang telah dikembangkan di Jawa Tengah antara lain :

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Udang | 9. Batik Garment |
| 2. Karet | 10. Pellets |
| 3. Kopi Biji | 11. Minyak Atsiri |
| 4. Tembakau | 12. Keerajinan Tangan |
| 5. Panili | 13. Emping Mlinjo |
| 6. Kulit Ternak | 14. Sepatu jadi |
| 7. Kayu jati gergajian | 15. Kayu lapis (plywood) |
| 8. Furniture | 16. Pakaian Jadi |

Upaya lainnya adalah terus melakukan pembinaan dan pengembangan komoditas-komoditas perkebunan berupa kapuk serta panili yang pernah menduduki pasaran ekspor. Komoditi ekspor non migas yang telah dikembangkan :

1. Hasil kerajinan ; kerajinan batu alam, bunga kering, angklung dan kayu meubel.
2. Hasil industri ; bola tennis, tapioka, pellets, biji mete, minyak terpentin, carpet, tepung udang, makanan ternak dan kayu gergajian.
3. Rempah-rempah ; jahe, jamu-jamuan, kunir.
4. Makanan olahan ; krupuk udang, carcia, jamur, kembang gula.
5. Perikanan ; ubur-ubur, bekicot, lintah laut, udang beku..

Langkah kebijaksanaan yang telah ditempuh untuk meningkatkan ekspor Jawa Tengah, khususnya ekspor non migas, diantaranya adalah :

1. Pelaksanaan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 5112/215/1985 dalam usaha penyempurnaan susunan organisasi dan tugas-tugas Penitia Kerja Tetap Pengembangan Ekspor Daerah Propinsi Jawa Tengah.
2. Penghentian pungutan oleh Pemerintah Propinsi terhadap 11 jenis komoditi ekspor non migas yaitu : plywood, kayu gergajian, rotan, karet, kelapa sawit, kopi, udang, ikan tuna, ikan tongkol, gapek dan jagung sesuai dengan Instruksi Gubernur Jawa Tengah No : 503/29958, tanggal 10 September 1984.
3. Pemberian kemudahan-kemudahan khususnya kemudahan bagi pengusaha yang akan melakukan ekspor cukup dengan SIUP atau ijin teknis sebagaimana yang tertuaang dalam Paket Kebijaksanaan 15 Desember 1987.
4. Paket kebijaksanaan 21 Nopember 1988 tentang Deregulasi Bidang Perdagangan, Industri, Pertanian dan Perhubungan Laut.

Disamping langkah kebijaksanaan diatas telah diusahakan pula peningkatan mutu komoditi ekspor dengan jalan menetapkan standar mutu bagi beberapa jenis bagi beberapa jenis komoditi antara lain minyak atsiri, tembakau dan sebagainya. Langkah lainnya adalah mengikutsertakan pengusaha/eksportir Jawa Tengah dalam setiap kesempatan baik dalam negeri maupun di luar negeri dalam usaha meningkatkan kontak dagang dengan para pembeli dalam atau luar negeri.

Sedangkan realisasi impor Jawa Tengah tahun 1992 – 1996 cenderung naik, sampai dengan tahun 1996 tercatat sebesar 1.836 juta US \$, naik 18,78 % dari tahun

sebelumnya . Untuk menaikkan peran industri, impor bahan penolong naik 28,44 % sementara untuk impor barang modal naik dua kali lipat dari tahun sebelumnya

Impor Jawa Tengah diarahkan untuk menopang pertumbuhan industri dalam negeri dengan melakukan kegiatan impor barang modal, bahan baku/penolong yang memang pada kenyataannya belum bisa dihasilkan sendiri atau dipandang masih langka. Disamping itu juga kebijaksanaan impor ditujukan untuk melindungi industri di Jawa Tengah yang menyerap tenaga kerja terlatih. Untuk menjamin penyediaan barang yang teratur, maka ditunjang dengan keagenan tunggal yang mewakili merk tertentu.

4.6. Penanaman Modal

Pembangunan Daerah memerlukan investasi yang terus meningkat dan harus dicukupi dengan memperhatikan kemampuan daerah sendiri dan kemampuan nasional. Untuk itu diperlukan pengerahan dana tabungan masyarakat, tabungan pemerintah dan dana dari luar.

Pembangunan ekonomi mempunyai arti pengolahan kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal , penggunaan teknologi tepat guna, peningkatan kemampuan berorganisasi dan menagement sehingga membawa manfaat bagi daerah serta dapat menjamin kelangsungan pembangunan. Pemanfaatan teknologi harus dapat meningkatkan produksi dan produktivitas tenaga kerja.

Peningkatan peran serta dalam pembangunan ekonomi dengan penyediaan porsi investasi lebih besar kepada swasta. Sasaran investasi sektor swasta pada dasarnya dipisahkan menjadi 2 (dua) yaitu melalui PMA/PMDN serta investasi yang tanpa fasilitas PMA/PMDN (non PMD/PMDN). Investasi yang dilakukan oleh swasta tersebut merupakan wujud tanggung jawab masyarakat dalam pembangunan secara umum dan pembangunan ekonomi secara khusus. Nilai Investasi yang ditanamkan oleh sektor swasta di Wilayah Jawa Tengah dapat dilihat nilai PMA yang telah mendapatkan surat persetujuan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4.5.

Tabel 4.5.
Nilai PMA Yang Telah Mendapatkan Surat Persetujuan Tetap
Di Jawa Tengah Tahun 1993 –2001
(ribuan \$ US)

Lapangan Usaha	1993		1995		1997		1999		2001	
	nilai	%	Nilai	%	nilai	%	nilai	%	nilai	%
1. Pertanian	1.040,00	0,001	6.687	0,40	11.276,71	0,51	628,24	0,49	5.400,32	5,59
2. Pertambangan dan Penggalian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Industri Pengolahan	79.552,18	82,54	283.642,83	17,06	1.946.944,27	87,64	109.554,21	85,65	60.140,69	62,21
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	0	0	0	0	0	0	0	0	9.554,51	9,88
5. Bangunan	1.350,00	1,401	28.017,50	1,69	0	0	0	0	0	0
6. Perdagangan, Restoran dan Hotel	10.000	10,38	24.966,48	1,50	21.277,11	0,96	11.969,66	9,36	9.041,82	9,35
7. Pengangkutan dan Telekomunikasi	0	0	1.309.449,53	78,77	242.028,81	10,89	7.020,00	5,49	8.574,65	8,87
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Jasa-jasa	0	0	9.614,0	0,58	0	0	0	0	3.970	4,11
Jumlah	96.384,37	100	9.614,0	100	2.221.526,90	100	127.915,63	100	96.681,99	100

Sumber Data : BPS, Jawa Tengah Dalam Angka berbagai edisi

Tabel 4.6. dapat dilihat bahwa PMDN yang berminat di Jawa Tengah sebagian besar di sektor Industri Pengolahan yang kemudian diikuti oleh sektor perdagangan, restoran dan hotel. Sedangkan untuk PMA lebih berminat pada Sektor Pengangkutan dan Telekomunikasi , yang diikuti oleh Sektor industri pengolahan. Sedangkan pada sub sektor tanaman bahan makanan hanya diminati oleh PMDN sementara PMA tidak berminat samasekali.

Tabel 4.6.
Nilai PMDN Yang Telah Mendapatkan Surat Persetujuan Tetap
Di Jawa Tengah Tahun 1993 -2001
(Jutaan Rp.)

Lapangan Usaha	1993		1995		1997		1999		2001	
	nilai	%	Nilai	%	nilai	%	Nilai	%	nilai	%
1. Pertanian	0	0	68.372,5	1,26	39.500,00	2,02	0	0	0	0
2. Pertambangan dan Penggalian	0	0	0	0	0	0	10.000,00	0,96	0	0
3. Industri Pengolahan	27.980.059,21	93,76	4.629.808,16	85,22	1.794.461,29	91,87	484.052,42	46,60	2.508.347,97	78,11
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	0	0	0	0	500,00	0,03	106.774,82	10,28	0	0
5. Bangunan	0	0	29.488,00	0,54	2.500,0	0,13	193.381,38	18,62	267.409,0	8,33
6. Perdagangan, Restoran dan Hotel	75.518,0	1,94	675.045,00	10,49	0	0	0	0	1.850,00	0,06
8 Pengangkutan dan Telekomunikasi	0	0	27.481,47	0,15	10.250,00	0,53	0	0	402.000,00	12,52
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	0	0	0	0	46.064	2,36	160.000,00	15,4	31.612,00	9,84
9. Jasa-jasa	52.871,73	1,77	2.600,00	0,05	59.921,42	3,07	84.480,5	8,13	0	0
Jumlah	96.384,37	100	5.432.795,13	100	1.953.196,71		1.038.689,12	100	3.211.218,97	100

Sumber Data : BPS, Jawa Tengah Dalam Angka berbagai edisi

Sebagai upaya untuk menunjang dan mendukung usaha pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi maka dalam bidang pengembangan dunia usaha di Jawa Tengah telah ditempuh berbagai kebijaksanaan dalam rangka menyediakan dan menciptakan iklim sejuk bagi investor yang telah dicanangkan sejak Pelita III, yang

kemudian dikembangkan dari Pelita ke Pelita yang meliputi pemberian berbagai fasilitas dan kemudahan serta penyediaan prasarana yang cukup antara lain :

1. Pelayanan perijinan-perijinan daerah melalui sistem pelayanan tunggal (*one stop service*) atas ijin-ijin lokasi dan pembebasan hak/pembelian tanah, ijin HGB/HGU/ HP, ijin undang-undang gangguan, ujin bangunan.
2. Pelayanan perijinan/perpanjangan ijin kerja tenaga asing.
3. Penyediaan data potensi Jawa Tengah dan bentuk profil investasi dan profil proyek.
4. Penyediaan lokasi wilayah/kawasan industri, untuk memudahkan perencanaan dan penyediaan prasarana maupun upaya pengendalian pencemaran/limbah.
5. Penyediaan prasarana dan sarana fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan investor.

BAB V.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Guna menjawab tujuan penelitian yang telah ditetapkan dalam penelitian ini yaitu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto Jawa Tengah dan menganalisis pengaruh krisis ekonomi terhadap Produk Domestik Regional Bruto Jawa Tengah dipakai alat regresi dengan metode *Ordinary Least Square* . Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan rentang waktu selama 22 tahun mulai tahun 1980 sampai dengan 2001. Estimasi dengan menggunakan bantuan paket program Eviews'3 dan sebelumnya dilakukan pengujian asumsi klasik.

5.1. Uji Asumsi Klasik

Guna mengetahui kondisi data penelitian yang *best, linear and unbiased estimation (blue)* sebelum estimasi perlu dilakukan uji asumsi klasik *multikolinerity, heteroskedasitas* dan *autokolerasi* adalah sebagai berikut :

Uji Multikolinearity

Uji Multicolinearity dengan menggunakan metode regresi parsial. Cara regresi parsial antar variabel bebas, bila nilai R^2 regresi parsial masing-masing variabel bebas lebih besar dari nilai R^2 model utama maka terjadi multikolinearity. Hasil uji deteksi multicolinearity adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.
Hasil Uji Multicolenearity Dengan Regresi Parsial

Variabel Dependen	Variabel Independen	R ²
lnPDRB	lnEK, lnIM, lnIA, lnID, lnAK, lnPJK, LnTAB, Dummy	0,97
lnEK	lnIM, lnIA, lnID, lnAK, lnPJK, LnTAB, Dummy	0,86
lnIM	lnEK, lnIA, lnID, lnAK, lnPJK, LnTAB, Dummy	0,82
lnIA	lnEK, lnIM, lnID, lnAK, lnPJK, LnTAB, Dummy	0,80
lnID	lnEK, lnIM, lnIA, lnAK, lnPJK, LnTAB, Dummy	0,52
lnAK	lnEK, lnIM, lnIA, lnID, lnPJK, LnTAB, Dummy	0,93
lnPJK	lnEK, lnIM, lnIA, lnID, lnAK, LnTAB, Dummy	0,95
lnTAB	lnEK, lnIM, lnIA, lnID, lnAK, lnPJK, Dummy	0,89

Hasil regresi antar variabel penjelas menunjukkan bahwa nilai R² (0,86 ; 0,82 ; 0,80 ; 0,52; 0,93; 0,95; 0,89) lebih kecil dari hasil regresi persamaan utama (0,97). Dengan demikian data persamaan ada gejala multikolinearity.

Uji Heteroskedasitas

Uji heteroskedasitas dengan menggunakan uji PARK. Uji dilakukan dengan 2 (dua) tahap. Tahap pertama , melakukan perhitungan regresi dengan OLS untuk mendapatkan residual. Tahap kedua, residual yang didapatkan dikuadratkan

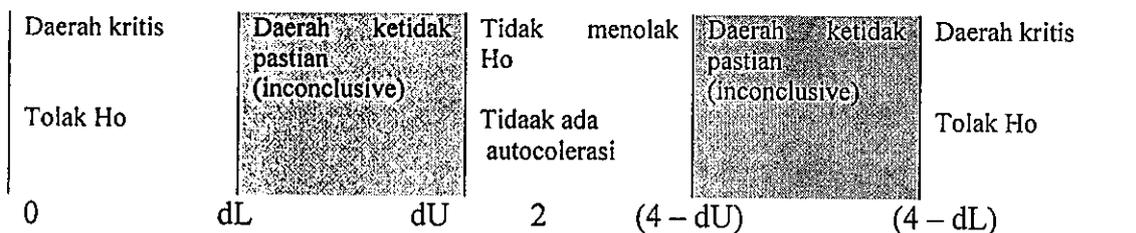
dan menjadi suatu variabel dependen pada model yang bersangkutan, kemudian dilakukan regresi dengan OLS. Jika nilai β melalui uji secara statistik signifikan maka data terdapat heteroskedasitas. Hasil uji heteroskedasitas persamaan adalah sebagai berikut :

$$\begin{array}{l} \ln\text{RESID2} = -477,36 + -2,69\ln\text{EK} + 0,68\ln\text{IM} - 0,49\ln\text{IA} + 42,32\ln\text{ID} \\ \text{SE} \quad (488,49) \quad (1,95) \quad (1,16) \quad (0,97) \quad (1,37) \\ \text{t hit} \quad (-0,977) \quad (-1,380) \quad (0,589) \quad (1,107) \quad (-0,362) \\ \\ \quad \quad \quad + 42,32\ln\text{AK} - 4,413 \ln\text{PJK} - 2,802\ln \text{TAB} + 6,76 \text{ Dummy} \\ \text{SE} \quad (34,13) \quad (8,44) \quad (4,51) \quad (4,40) \\ \text{t hit} \quad (1,240) \quad (-0,523) \quad (-0,622) \quad (1,537) \end{array}$$

Hasil regresi menunjukkan bahwa masing-masing variabel penjelas tidak ada yang signifikan, artinya bahwa data tidak terdapat heteroskedasitas.

Uji Autokolerasi

Salah satu pengujian yang umum digunakan untuk mengetahui autokolerasi adalah yang dikembangkan oleh J. Durbin dan G. Watson (1951). Pengujian ini sebagai statistik-d Durbin Watson yang dihitung berdasarkan jumlah selisih kuadrat nilai-nilai taksiran faktor-faktor gangguan yang berurutan dan biasanya nilainya telah tercantum pada hasil penghitungan regresi bersama-sama dengan nilai R^2 , t ratio dan F hitung. Secara spesifik, untuk uji Durbin-Watson ada dua sisi, terdapat lima himpunan daerah untuk nilai d seperti pada gambar dibawah ini :



Dari gambar tersebut dapat diterjemahkan sebagai berikut :

- Jika d lebih kecil daripada dL atau lebih besar daripada $(4 - dL)$, maka hipotesis nol ditolak, dengan pilihan pada alternatif yang berarti terdapat autokolerasi .
- Jika d terletak antara dU dan $(4 - dU)$, maka hipotesis nol diterima, yang berarti tidak ada autokolerasi.
- Jika nilai d terletak antara dL dan dU atau diantara $(4 - dU)$ dan $(4 - dL)$, maka uji Durbin-Watson tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti (*inconclusive*) . Untuk nilai-nilai ini, tidak dapat (pada suatu tingkat signifikansi tertentu) disimpulkan ada tidaknya autokolerasi.

Hasil perhitungan dengan OLS didapatkan nilai DW test sebesar 1,702 ; sesuai tabel nilai Durbin Watson (1 %) adalah bahwa $dL = 0,66$; $dU = 1,71$; $(4 - dU) = 2,31$. Dapat dilihat bahwa d hitung berada pada kisaran dU dan $(4 - dU)$, artinya data tidak ada gejala Autokolerasi.

Hasil uji asumsi klasik baik multikolinearity, heteroskedasitas maupun autokolerasi maka data telah terbebas dari gejala asumsi klasik ..

5.2. Hasil Analisis

Setelah lolos dari pengujian uji asumsi klasik, artinya data telah terbebas dari penyakit multikolinierity, autokolerasi dan heteroskedasitas maka estimasi dapat dilanjutkan dengan menggunakan OLS yang hasil dapat diringkas sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \ln PDRB = & 25,925 + 0,124 \ln EK^{**} - 0,005 \ln IM + 0,058 \ln IA^{**} + 0,122 \ln ID \\ SE & (12,580) \quad (0,050) \quad (0,029) \quad (0,024) \quad (0,035) \\ t \text{ hit} & (2,060) \quad (2,473) \quad (-0,179) \quad (0,061) \quad (0,138) \\ & + 0,121 \ln AK - 0,284 \ln PJK^{**} + 0,308 \ln TAB^{**} - 0,048 \text{ DUMMY}^{**} \\ SE & (0,879) \quad (0,217) \quad (0,116) \quad (0,113) \\ t \text{ hit} & (0,139) \quad (-2,352) \quad (2,659) \quad (-2,436) \end{aligned}$$

$$R^2 = 0,976$$

$$DW = 1,701$$

$$F \text{ hit} = 68,921$$

Keterangan :

** = signifikan pada α 5 %

* = signifikan pada α 10 %

Hasil estimasi dengan metode OLS angka koefesien R^2 sebesar 0,976 , menunjukkan bahwa ke-8 (delapan) variabel bebas dapat menjelaskan sebesar 97,6 % terhadap variabel $\ln PDRB$ Jawa Tengah pada periode penelitian, sedangkan sisanya sebesar 2,4 % dijelaskan oleh sebab lain diluar model .

Pada uji F didapatkan F hitung sebesar 68,921 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Karena probabilitas (0,000) jauh lebih kecil dari 0,05 , maka ke - 8 (delapan) variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel $\ln PDRB$. Artinya variabel $\ln EK$, $\ln IM$, $\ln IA$, $\ln ID$, $\ln PJK$, $\ln TAB$, $\ln AK$ dan variabel Dummy secara bersama-sama berpengaruh terhadap $\ln PDRB$.

Uji t untuk menganalisis pengaruh individual masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Aspek yang dianalisis untuk uji t adalah kesesuaian tanda koefisien regresi dengan teori, besarnya koefisien regresi dan besarnya nilai t hitung untuk melihat tingkat signifikansi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel $\ln Ek$, $\ln EK$, $\ln ID$, $\ln TAB$, $\ln AK$ berpengaruh positif terhadap nilai $\ln PDRB$. Sedangkan variabel $\ln IM$, $\ln PJK$ dan $DUMMY$ berpengaruh negatif terhadap $\ln PDRB$. Dari aspek tanda koefisien telah sesuai dengan harapan teori.

Aspek kuatnya pengaruh dapat dilihat dari besarnya t hitung dan tingkat signifikansi. Besarnya t hitung untuk variabel $\ln EK$ sebesar 2,473, variabel $\ln IA$ sebesar 2,325 ; variabel $\ln PJK$ sebesar -2,352 ; variabel $\ln TAB$ sebesar 2,659 dan variabel $DUMMY$ sebesar -2,436 masing-masing berpengaruh secara signifikan pada α 5 % terhadap $\ln PDRB$. Sedangkan variabel $\ln IM$ dengan t hitung sebesar -0,179 ; variabel $\ln ID$ dengan t hitung sebesar 0,061 serta variabel $\ln AK$ dengan t hitung sebesar 0,138 ; masing-masing berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel $\ln PDRB$

Berdasarkan besarnya koefisien regresi menunjukkan konstanta sebesar 25,925 mempunyai arti bahwa nilai $\ln PDRB$ sebesar 25,925 satuan apabila tidak ada variabel bebas sama sekali . Koefisien regresi untuk variabel $\ln EK$ sebesar 0,124 , mempunyai arti bahwa setiap kenaikan nilai variabel $\ln EK$ sebesar 1 satuan akan menaikkan nilai $\ln PDRB$ sebesar 0,124 satuan dengan asumsi faktor-faktor lainnya tetap (*ceteris paribus*). Koefisien regresi variabel $\ln IM$ sebesar -0,005, artinya bahwa

setiap kenaikan nilai variabel $\ln IM$ sebesar satu satuan akan menurunkan nilai $\ln PDRB$ sebesar 0,005 satuan dengan asumsi faktor-faktor yang lainnya tetap (*ceteris paribus*). Besarnya koefisien regresi variabel $\ln IA$ sebesar 0,058 , mempunyai arti bahwa setiap kenaikan variabel $\ln IA$ sebesar satu satuan akan meningkatkan nilai $\ln PDRB$ sebesar 0,058 satuan dengan asumsi faktor-faktor yang lainnya tetap (*ceteris paribus*). Besarnya koefisien regresi variabel $\ln ID$ sebesar 0,002 , mempunyai arti bahwa setiap kenaikan variabel $\ln ID$ sebesar satu satuan akan meningkatkan nilai $\ln PDRB$ sebesar 0,002 satuan dengan asumsi faktor-faktor yang lainnya tetap (*ceteris paribus*). Koefisien regresi variabel $\ln AK$ sebesar 0,121 , mempunyai arti bahwa setiap kenaikan variabel $\ln AK$ sebesar satu satuan akan meningkatkan nilai $\ln PDRB$ sebesar 0,121 satuan dengan asumsi faktor-faktor yang lainnya tetap (*ceteris paribus*). Koefisien regresi variabel $\ln PJK$ sebesar - 0,284 , mempunyai arti bahwa setiap kenaikan variabel $\ln PJK$ sebesar satu satuan akan menurunkan nilai $\ln PDRB$ sebesar 0,284 satuan dengan asumsi faktor-faktor yang lainnya tetap (*ceteris paribus*). Besarnya koefisien regresi variabel $\ln TAB$ sebesar 0,308 , mempunyai arti bahwa setiap kenaikan variabel $\ln TAB$ sebesar satu satuan akan meningkatkan nilai $\ln PDRB$ sebesar 0,308 satuan dengan asumsi faktor-faktor yang lainnya tetap (*ceteris paribus*). Koefisien variabel Dummy menunjukkan angka negatif mempunyai arti bahwa setiap terjadi kondisi krisis ekonomi akan mengakibatkan penurunan nilai $\ln PDRB$.

Hasil analisis menunjukkan bahwa ekspor barang berpengaruh signifikan terhadap PDRB pada $\alpha 5 \%$. PDRB merupakan indikator utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Hasil tersebut mendukung hipotesis bahwa ekspor sebagai

motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi. Apabila dihubungkan dengan dengan teori pertumbuhan regional berbasis ekspor, bahwa ekspor dipandang sebagai penggerak utama perekonomian lokal (Tibot, 1962). Kemudian lebih lanjut diungkapkan oleh Bendavid – Val (1991) bahwa kegiatan ekspor merupakan mesin pertumbuhan. Pendapat tersebut mendukung temuan bahwa ekspor barang yang merupakan permintaan barang eksternal baik ke Luar Negeri maupun ke lain Propinsi menentukan nilai PDRB Jawa Tengah. Hal tersebut diasumsikan bahwa pendapatan yang semula diterima oleh kegiatan ekspor barang yang akan dibelanjakan di daerah setempat sehingga mempengaruhi tingkat konsumsi penduduk dan pada akhirnya secara multiplier akan mempengaruhi perekonomian daerah melalui peningkatan PDRB.

Sedangkan impor barang pada hasil analisis menunjukkan berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan ($\alpha : 86 \%$) terhadap PDRB Jawa Tengah. Pada ekonomi makro variabel impor merupakan suatu kebocoran, kondisi tersebut ternyata tidak signifikan pada perekonomian Jawa Tengah melalui nilai PDRB .

Impor barang dapat diartikan sebagai pembelanjaan barang dari eksternal baik luar negeri maupun ke luar Propinsi lain . Temuan pada penelitian ini adalah bahwa impor barang Jawa Tengah relatif sedikit dibelanjakan untuk barang – barang konsumsi . Impor barang sebagian besar dibelanjakan untuk pemenuhan kebutuhan kegiatan industri sehingga dapat meningkatkan nilai tambah. Impor barang tersebut sebagian untuk impor barang modal, bahan penolong dan bahan baku untuk sebagai input industri.

Meskipun impor barang merupakan suatu kebocoran tetapi hasilnya tidak signifikan bisa dimengerti, karena impor barang tetap akan menghasilkan nilai tambah sehingga tidak berpengaruh yang berarti bagi nilai PDRB. Hal ini didukung dengan kenyataan bahwa industri di Jawa Tengah masih didominasi oleh Industri substitusi impor yang mempunyai *local content* masih rendah sehingga impor barang untuk mendukung kegiatan industri lebih mendominasi dari pada impor barang konsumsi.

Investasi yang dilakukan oleh Asing ternyata berpengaruh secara signifikan pada α 5 % terhadap PDRB . Investasi Asing dapat diartikan mendatangkan modal dari luar negeri (*Foreign Direct Investment / FDI*) sebagai untuk mengatasi ketidakmampuan tabungan dalam menyediakan modal untuk investasi. FDI juga diharapkan dapat meningkatkan ketrampilan manajerial sumberdaya karena adanya transfer pengetahuan dari luar. Lebih lanjut menurut Gilis (1992) bahwa manfaat yang diperoleh dengan adanya modal asing antara lain : 1) transfer modal, 2) penciptaan lapangan pekerjaan, 3) transfer teknologi, 4) akses ke pasar dunia dan transfer kemampuan manajerial.

Manfaat tersebut berdampak pada tingkat pendapatan penduduk dan akan berakhir pada peningkatan nilai PDRB. Disamping itu modal asing yang ditanamkan di Jawa Tengah untuk pendirian industri yang berorientasi ekspor ke luar negeri akan memberikan nilai tambah sehingga akan mengakibatkan peningkatan nilai PDRB.

Seperti diungkapkan teori pertumbuhan Harrod-Domar bahwa yang mempunyai kunci didalam proses pertumbuhan ekonomi adalah investasi , khususnya

watak ganda yang dimiliki industri. *Pertama* industri menciptakan pendapatan yang merupakan dampak dari penawaran dan *kedua*, industri memperbesar produksi perekonomian dengan cara meningkatkan dengan cara meningkatkan stock modal yang merupakan dampak dari penawaran .

Temuan lainnya pada penelitian ini adalah PMDN yang dilakukan oleh investor domestik ternyata berpengaruh positif tetapi tidak signifikan ($\alpha : 95 \%$) terhadap nilai PDRB. Kenyataan tersebut dapat dianggap bahwa PMDN belum dapat diandalkan untuk meningkatkan perekonomian Jawa Tengah. Meskipun sebagian besar PMDN menanamkan modalnya untuk sektor industri pengolahan yang merupakan sector andalan tetapi belum mampu mempengaruhi peningkatan nilai PDRB.

Hal ini disebabkan karena meskipun investasi PMDN yang dilakukan untuk industri yang berorientasi ekspor tetapi kenyataannya masih membutuhkan kandungan lokal yang rendah. Hal ini menyebabkan nilai tambah yang diperoleh dari industri tersebut dibelanjakan kembali untuk pemenuhan faktor-faktor produksi yang diperlukan berasal dari luar negeri. Sehingga nilai tambah yang diperoleh akan berkurang dan tidak berdampak pada nilai PDRB.

Asumsi lain yang menyebabkan PMDN belum dapat berdampak pada peningkatan PDRB antara lain manajemen industri yang belum efisien serta penguasaan teknologi yang masih kalah bersaing dengan investasi asing . Hal tersebut menyebabkan produksi masih tinggi yang akan berdampak pada berkurangnya nilai tambah yang dihasilkan.

Hasil empiris menunjukkan bahwa angkatan kerja berpengaruh positif tetapi tidak signifikan ($\alpha : 89 \%$) terhadap nilai PDRB Jawa Tengah. Angkatan kerja merupakan sumber utama dari tenaga kerja serta diharapkan dapat berpengaruh signifikan terhadap peningkatan nilai PDRB. Melalui pendapatan/upah yang diterima oleh tenaga kerja Jawa Tengah akan meningkatkan pengeluaran yang dibelanjakan untuk konsumsi rumah tangga.

Kenyataan bahwa perekonomian Jawa Tengah mengalami dualisme, artinya sumbangan terbesar terhadap PDRB berasal dari sektor industri pengolahan yang kemudian diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran serta baru diikuti sektor pertanian. Sementara sumbangan terbesar terhadap penyerapan tenaga kerja berasal dari sektor pertanian, kemudian diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran yang baru diikuti dari sektor industri pengolahan. Sehingga meskipun sektor industri industri pengolahan menempati urutan pertama dalam menyumbang PDRB tetapi dalam penyerapan tenaga kerja menempati urutan ke tiga.

Melihat kenyataan bahwa angkatan kerja di Jawa Tengah tidak berpengaruh secara signifikan disebabkan karena : 1) Industri yang berdiri di Jawa Tengah belum menyediakan kesempatan kerja yang mencukupi bagi tenaga kerja Jawa Tengah, 2) Rendahnya tingkat pendidikan penduduk di Jawa Tengah sehingga yang terserap untuk tenaga kerja industri rendah, 3) rendahnya tingkat ketrampilan tenaga kerja Jawa Tengah sehingga untuk memenuhi permintaan tenaga kerja sektor industri mengambil tenaga kerja dari luar Propinsi, 4) Penduduk Jawa Tengah masih banyak

yang bekerja di sektor pertanian. Sementara pendapatan yang diperoleh dari sektor Pertanian lebih rendah dari sektor industri . Kenyataan lain bahwa sektor pertanian tidak memerlukan tenaga kerja yang berpendidikan dan ketrampilan khusus .

Tabungan masyarakat merupakan salah satu sumber dana investasi di Jawa Tengah sehingga mampu secara signifikan pada α 5 % meningkatkan nilai PDRB. Tabungan yang digalang dari masyarakat tersebut berasal dari pendapatan penduduk yang ditabung baik di bank pemerintah maupun swasta.

Kemampuan tabungan dalam meningkatkan PDRB perlu ditingkatkan lagi untuk mengurangi modal asing yang masuk di Jawa Tengah. Menurut Keynes bahwa tabungan disamping dipengaruhi oleh pendapatan agregatif juga dipengaruhi oleh hasrat menabung.

Hubungan tabungan dengan pembiayaan investasi tidak dapat dilepaskan dengan pembentukan modal. Masyarakat tidak melakukan keseluruhan kegiatannya pada saat ini hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang mendesak (sekarang), tetapi mengarahkan sebagian dari modal untuk pembentukan barang modal, alat-alat dan perlengkapan, pabrik dan peralatannya dan lain-lain. Dalam pengertian ini pemebentukan modal merupakan investasi yang menaikkan stock modal yang kemudian dapat menentukan output dan pendaptan regional.

Proses pembentukan modal tersebut bersifat komulatif dan membiayai diri sendiri, serta mencakup 3 tahap yang saling berkaitan yaitu : 1) adanya tabungan nyata dan kenaikan, 2) adanya lembaga keuangan dan perkreditan untuk menggalakkan tabungan dan menyalurkannya ke jalur dan sasaran yang dikehendaki,

dan 3) menggunakan tabungan untuk investasi barang modal. Kenyataan bahwa tabungan masyarakat mempunyai peranan yang signifikan dalam meningkatkan PDRB Jawa Tengah.

Hasil analisis ditemukan bahwa pajak mempunyai dampak negatif yang signifikan pada α 5 % terhadap PDRB. Maksud diadakan pajak oleh pemerintah menurut Goeritno Mangkoesobroto (1999) adalah untuk pembiayaan penyediaan barang dan jasa publik, untuk mengatur perekonomian dan mengatur konsumsi masyarakat. Sebagai fungsi pengatur (*regulator*) pajak dimaksudkan untuk redistribusi pendapatan serta stabilitas ekonomi serta untuk mengatur kegiatan-kegiatan produsen dan konsumen.

Sehingga pajak berdampak pada perilaku individual masyarakat (sektor rumah tangga) karena dapat menyebabkan jumlah yang dibelanjakan akan berkurang artinya pajak akan menyebabkan *multiplier efek*, dengan perubahan pajak akan mempengaruhi pendapatan disposibel kemudian akan berpengaruh pada konsumsi dan seterusnya mempengaruhi pengeluaran agregat dan pendapatan regional.

Selanjutnya menurut Suparmoko (1999) bahwa pengaruh pajak terhadap produksi antara lain mempengaruhi berkurangnya kemampuan untuk mengadakan investasi, menabung dan bekerja.

Hasil empiris menunjukkan bahwa krisis ekonomi yang diukur dengan menggunakan variabel dummy ternyata berpengaruh negatif dan signifikan pada α 5 % terhadap PDRB. Hal ini mudah dipahami karena krisis ekonomi yang berawal dari

krisis moneter dan berlanjut pada krisis multidimensi telah menyebabkan perekonomian tumbuh negatif.

Krisis menyebabkan kemacetan diberbagai sektor yang menjadi pilar perekonomian , antara lain sektor riil, sektor perbankan, sektor tenaga kerja, sektor rumah tangga, dan sektor pemerintah. Kondisi demikian ternyata berdampak langsung pada penurunan PDRB Jawa Tengah.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Ekspor barang, investasi asing, tabungan masyarakat, penerimaan pajak, berpengaruh terhadap PDRB Jawa Tengah dengan tingkat signifikan pada α 5 %. Besarnya koefisien regresi untuk ekspor barang sebesar 0,124 ; investasi asing sebesar 0,002, penerimaan pajak sebesar -2,284 dan tabungan sebesar 0,308 .
2. Impor barang , investasi domestik dan angkatan kerja tidak berpengaruh secara signifikan bagi nilai PDRB Jawa Tengah.
3. Tidak Signifikannya impor barang disebabkan impor yang dilakukan merupakan impor untuk input produksi yaitu barang modal, penolong dan bahan baku .
4. Investasi domestik tidak dapat diandalkan dalam peningkatan PDRB karena kegiatan usaha yang dilakukan merupakan industri substitusi impor yang mempunyai *lokal contents* rendah sehingga nilai tambah yang dihasilkan untuk menutup biaya produksi .
5. Angkatan kerja yang diharapkan sebagai sumber tenaga kerja di Jawa Tengah tidak dapat diharapkan untuk dapat meningkatkan nilai PDRB karena sebagian tenaga kerja bekerja di sektor pertanian .

6.2 Limitasi Studi

Babera limitasi yang perlu diketengahkan dari penelitian ini antara lain :

1. Model dalam penelitian ini banyak merujuk penelitian yang berskala Nasional/ negara bukan regional. Sehingga model yang dikembangkan oleh penulis merupakan pendekatan ekonomi makro dan tidak menggunakan pendekatan ekonomi regional .
2. Penelitian hanya dapat dilakukan pada rentang waktu dari tahun 1980 –2001 , sehingga perlu kehati-hatian dalam *mengenaralisir* hasilnya , terutama dengan adanya variabel dummy.
3. Hasil dari studi ini merupakan kebijakan yang masih bersifat makro, sehingga perlu dikembangkan penelitian yang lebih spesifik untuk mengkaji suatu sektor yang menjadi unggulan di Jawa Tengah dengan menggunakan *data cross section*
4. Studi ini bersifat kuantitatif sehingga fenomena yang bersifat kualitatif tidak terakomodasi dalam model penelitian ini .

6.3. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan hasil penelitian, beberapa upaya perlu dilakukan untuk menggerakkan pembangunan melalui peningkatan PDRB di Jawa Tengah antara lain :

1. Ekpor di Jawa Tengah perlu terus didorong melalui upaya – upaya promosi baik ke luar negeri dan ke luar daerah serta membuat perangkat peraturan secara

bertahap untuk mengurangi hambatan-hambatan ekspor (tata niaga). Meningkatkan ekspor yang bermuatan *local content* tinggi sehingga dapat menekan kegiatan impor.

2. Peranan Investasi Asing dan Investasi Domestik sebagai pendukung utama dalam investasi swasta harus lebih diarahkan pada orientasi ekspor dan Pemerintah Jawa Tengah menciptakan iklim usaha yang semakin mendorong kehadiran investasi baik PMDN maupun PMA. Bidang usaha yang dilakukan oleh investor diupayakan bukan merupakan suatu kegiatan substitusi impor tetapi berorientasi pada pasar (*market oriented*).
3. Tabungan masyarakat merupakan salah satu sumber pembiayaan investasi melalui kredit perlu digerakkan dengan penggalakan tabungan yang terorganisir baik melalui jajaran pemerintah maupun swasta pada lapisan paling bawah dengan institusi keuangan yang profesional.
4. Perlu pengembangan sumber daya manusia yang diarahkan pada peningkatan harkat-martabat dan kemampuan serta kepercayaan pada diri sendiri untuk peningkatan mutu dan kemampuan sehingga menghasilkan tenaga kerja yang handal.
5. Pajak yang berfungsi sebagai regulator perekonomian perlu diatur melalui peraturan perundangan sampai pada tingkat pemerintahan yang paling bawah sehingga tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.

Daftar Pustaka

- Alkadri, 1999, *Sumber-sumber Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Selama 1969 – 1997*, Jurnal Pusat Studi Indonesia, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Aliman dan A. Budi Purnomo, 2001, *Kausalitas Antara Ekspor dan Pertumbuhan Ekonomi*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol 16, No. 2, 122 – 137
- Lincoln Arsyad, 1999, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, BPFE, Yogyakarta
- Davey, 1998, *Pembiayaan Pemerintah Daerah* terjemahan Hamdan Amin dan A.T. Pakpahan, UI Press Jakarta.
- Sumitro Djojohadikusumo, 1994, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, Cetakan kedua, PT Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta
- Dornbusch, Rudiger dan Fisher, Stanley, 1997, *Makro Ekonomi*, terjemahan J. Mulyadi, edisi keempat, Penerbit Gelora Aksara Pratama, Jakarta
- Dumairy, 1999, *Perekonomian Indonesia*, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Gujarati, Damodar, 1999, *Ekonometrika Dasar*, Cetakan Keenam, Gelora Aksara Pratama, Jakarta
- Hondroyiannis, George dan Paparetrou, Evengelia, 1999, *Sebuah Pengujian Terhadap Hubungan Kausalitas Antara Belanja Pemerintah dan Pendapatan Pemerintah : Sebuah Analisis Kointegrasi*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 4, No.2, 183-193
- Jhingan, ML, 1999, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Cetakan Ketujuh, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Karimi, S. ,1986, *Ekspor dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*, Majalah Ilmu-Ilmu social Indonesia ke XIII, No. 2

- Rustiar Kamaluddin, 1998, *Pengantar Ekonomi Pembangunan*, Lembaga Penerbit Fak. Ekonomi Universitas Indoenesia, Jakarta
- Haryo Kuncoro, 2000, *Ekspansi Pengeluaran Pemerintah dan Responsivitas Sektor Swasta*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 5, 53 – 63
- Mudrajad Kuncoro, 1997, *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta
- Bambang Kustitunto dan Istikomah, 1999, *Peranan Penanaman Modal Asing (PMA) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia , Vol 14, No. 2, 1 – 3
- Mappaujung Maknun, 1995, *Hubungan Kausalitas Antara Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Beberapa Negara Asean*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia , Vol 10, No. 1, 67 – 68
- Guritno Mangkoesobroto, 1999, *Ekonomi Publik*, Edisi Ketiga, Cetakan Kedelapan, BPFE , Yogyakarta
- Farired Wijaya Mansoer, 1998, *Perilaku Tabungan : Kasus Perbandingan Negara-Negara Asean dan Negara Industri Maju 1978- 1996*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol 13, No.12, 61 – 70
- Faried Wijaya Mansoer, 1992, *Kompendium Ekonomika; Ekonomika Pertumbuhan dan International*, volume empat, BPFE, Yogyakarta.
- Nopirin, 1998, *Pertumbuhan Ekonomi dan Neraca Pembayaran Indonesia 1980 – 1996 Suatu Pendekatan Keynes dan Meneterist* , Kelola No. 18/VII/1998, 32 – 44
- Neni Pancawati, 2000, *Pengaruh Rasio Kapital Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, Stok Kapital dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan GDP Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol 15, No. 2, 179 –185
- Richardson, Henry W, 1991, *Dasar Dasar Ekonomi Regional*, terjemahan Paul Sihotang, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta
- Moch. Sadli, 1959, *Ekonomi Industri : Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa*, Jakarta

- Sukirno, Sadono, 2000, *Makro Ekonomi Modern Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sukirno, Sadono, 1999, *Pengantar Teori Makroekonomi*, Edisi Kedua, Cetakan Kesebelas, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sundrum, R.M, 1998, *Indonesia's Slow Economic Growth : 1981-1986*. Bulletin of Indonesia Economic Studies, Vol 14, No. 1 April
- Asis Soelistyo dan Faried Wijaya Mansoer, 1998, *Suatu Pendekatan Ekonometri Terhadap Ekonomi Makro Indonesia (1978-1994)*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol 13, No. 4, 30 – 39
- Soekarno, 1990, *Pembiayaan Investasi : Kendala dan Prospek*, ISEI, Jakarta
- Sanyoto Sastrowardoyo, 1994, "Overview" *Perkembangan Investasi di Indonesia Sebuah Pengantar*, Kelola No. 7/III/1994, 1-15
- Masdjidin Siregar, 1999, *Kausalitas Antara Ekspor dan PDB di Indonesia 1971 – 1997*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia Vol XLXII, No. 3, 313 – 329
- Suparmoko, 1992, *Keuangan Negara*, Edisi Keempat, Cetakan Keempat, BPFE, Yogyakarta
- Todaro, Michael, 1999, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi Keenam, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Agus Wantara, 1995, Analisis PAD DIY, Tesis S2 Msi FE UGM, Tidak dipublikasikan
- Agus Widarjono, 1999, *Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Analisis Kausalitas*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 4, N0.2
- Widodo, dan Hg Suseno Triyanto, 1990, *Indikator Ekonomi Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta
- Wihana Kirana dan Nurwandono, 1992, *Peranan Pembangunan Sektor Keuangan Dalam Mobilitas Dana dan Pertumbuhan Ekonomi*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, No. 1, Tahun VII 1992, 117 – 127